

“OTSUS DI UJUNG TANDUK”

(Januari – Maret 2005)



Sekilas Informasi

OLEH

**SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAAN
KEUSKUPAN JAYAPURA**

Juni 2005

Kata Pengantar

Para pembaca yang terkasih,

Dalam rangka mewujudkan maksud SKP Keuskupan Jayapura untuk terus menyajikan suatu analisis aktual terhadap perkembangan situasi sosial kemasyarakatan setiap tiga (3) bulan di Tanah Papua, maka bersama ini tersaji di hadapan pembaca sekalian, analisis aktual untuk bulan Januari-Maret 2005 dengan pilihan judul yang kami anggap merupakan tema utama yang berkembang dan menjadi bahan diskusi masyarakat selama triwulan tersebut, kami anggap penting untuk diangkat dalam analisa ini agar mendapat perhatian siapa saja tentang ancaman hancurnya tatanan politik dan pemerintahan baru yang mau dibangun di Papua. Adapun bahan-bahan ini kami cuplik terutama dari media lokal yang terbit di Jayapura dan berbagai terbitan serta sumber info lainnya yang kami anggap relevan untuk diketahui.

Perkenankanlah kami untuk menyampaikan permohonan maaf karena analisis ini diterbitkan sangat terlambat dari jangka waktu yang seharusnya. Akan tetapi kami tetap berharap bahwa bahan ini dapat membantu para pembaca untuk mengikuti dengan saksama berbagai arah perkembangan sosial di Papua di dalam kerangka norma-norma Hak Asasi Manusia. Semoga tulisan sederhana ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jayapura, Juni 2005

Sdri. Frederika korain
Penulis

Bagian I
Peta Hak Asasi Manusia di Papua, Januari-Maret 2005

A. Gambaran Situasi Hak Sipil dan Politik

2 Januari

Terkait telah dikeluarkannya PP No. 54/2004 tentang MRP, Direktur LP3BH Manokwari, Jan Kristian Warinussy mendesak Pemda Provinsi Papua untuk segera mengundang semua bupati dan walikota se-Papua guna menjelaskan aspek-aspek penting dari MRP dan mensosialisasikannya kepada masyarakat sesegera mungkin demi implementasi Otsus yang lebih menjawab kepentingan orang asli Papua.

3 Januari

Dua pengamat politik dari Uncen, Drs. Beatus Tambaip MA dan Drs. HB Bleskadit M.Si memprediksi bahwa dalam tahun 2005 tidak akan terjadi banyak aksi separatist dibanding tahun-tahun sebelumnya karena masyarakat Papua semakin mengedepankan semboyan 'Papua Zona Damai' dalam menyelesaikan tuntutan mereka. Kalaupun ada konflik, disinyalir hanya dimotori elite politik yang mempunyai kepentingan.

Data-data pada Polres Jayapura menunjukkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di lingkungannya, khususnya di Sentani akibat miras dan para korban umumnya pelajar SMP-SMU.

Direktur Yayasan Harapan Ibu (YHI) Provinsi Papua, Drs. David Wambrau M.Si menyatakan keprihatinannya atas semakin maraknya PSK di Kota Jayapura yang umumnya berusia belasan tahun. YHI sendiri sedang membina 500 PSK, dengan anggota berusia terendah adalah 14 tahun.

Kapolres Jayawijaya AKBP Drs. Agung Makbul, SH menyatakan, Berita Acara Pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi di kantor PT Pos dan Giro Wamena telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Wamena dan kini sedang dipelajari pihaknya.

4 Januari

Dr. Agus Sumule dan Ir. FA Wospakrik, M.Sc yang terlibat dalam Tim Asistensi Otsus Papua, meminta Pemerintah Provinsi Papua segera menindaklanjuti PP No. 54/2004 tentang MRP yang sudah disahkan pada 23 Desember 2004, sehingga Otsus dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Keduanya meminta pemerintah daerah untuk segera mensosialisasikan PP tersebut kepada masyarakat agar figur yang akan dipilih sebagai anggota MRP, merupakan wakil rakyat yang cerdas, pintar, bermoral dan punya tanggung jawab yang tinggi, bukan sekedar tokoh agama, adat atau tokoh perempuan.

Sementara itu, Drs. John Ibo, Ketua DPRD Papua mengaku belum mengetahui isi dari MRP itu sendiri karena belum menerima peraturan pemerintah tersebut secara tertulis.

Masyarakat Distrik Gamelia, Kabupaten Jayawijaya memalang kantor Distrik setempat sejak 17 Desember 2004 karena tidak puas terhadap Kepala Distrik, Markus Pekey, S.Sos. Menurut keterangan Ketua KNPI Gamelia, Baiter Jikwa, pemalangan terjadi karena beberapa alasan, sejak dilantik oleh Bupati David Hubi pada Januari 2004,

Kepala Distrik tidak pernah berada di tempat tugas; ia memanipulasi hak-hak masyarakat atas bantuan Raskin (*beras miskin*) bulan Juli 2004 sebanyak 16 ton, bulan Agustus 2004 sebanyak 16 ton dan Desember 2004 sebanyak 14 ton.

5 Januari

Ketua DPRD Papua, Drs. John Ibo menyatakan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Papua berlangsung sesuai UU Otsus dan UU Pemilu No. 32/2004, yakni, pemilihan langsung oleh rakyat. DPRD hanya menyeleksi dan menetapkan kandidat calon, kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menyelenggarakan pemilihan.

6 Januari

Berkas perkara tersangka kasus makar dalam peristiwa pengibaran bendera 1 Desember 2004 atas nama Filep Karma dan Yusak Pakage telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk disidangkan.

Anggota DPRD Provinsi Papua, Idrus Khalwani, SP mengaku prihatin terhadap tingginya angka kriminalitas di Kota Jayapura sepanjang 2004 sebagaimana data yang diberikan Polda Papua. Maka, untuk tahun 2005, Pemkot dan Polresta Jayapura serta aparat keamanan lainnya diminta melakukan langkah preventif untuk meminimalisir tingginya angka kriminalitas tersebut, terutama membatasi peredaran miras sebagai pemicu tingginya kejahatan dan kecelakaan lalu lintas.

7 Januari

Gubernur Papua, Drs. JP Solossa berpendapat bahwa isi MRP sudah sangat aspiratif dan akomodatif sebagaimana yang diharapkan rakyat Papua. Keberadaan MRP sebagai representasi kultural rakyat Papua.

Wagub Papua Constant Karma berangkat ke Jakarta untuk menerima PP MRP dari Menkopolkam, didampingi oleh anggota tim pembahasan MRP, Tony Rahail.

Penggantian Kasat Brimob Polda Papua dari pejabat lama, Kombes Pol. Drs. Robby Kaligis kepada pejabat baru AKBP Drs. Tatang Hermawan. Robby Kaligis dipromosikan menjadi Kabag Pers Korps Brimob Polri di Jakarta.

Meningkatnya kasus pemerkosaan di Biak akhir-akhir ini, membuat prihatin Ibu Marike Rumbiak yang sehari-hari bekerja sebagai kepala UGD RSUD Biak. Sesuai pengalamannya menangani korban yang datang dan meminta divisum, sebagian besar korban justru anak-anak dibawah umur; sedangkan para pelaku pemerkosaan umumnya dalam kondisi mabuk setelah mengkonsumsi miras.

9 Januari

2 orang pelaku pembunuhan petugas Pam Pemilu di Kampung Yowid, Distrik Okaba, Merauke pada 3 April 2004, Charles Basik-Basik (19 th) dan Tarsis Yolmen (20 th) divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Merauke.

10 Januari

7 anggota Perwakilan Komnas HAM Papua: Pdt. Fredrik Toam, Frits Ramandey, S.Sos, Zandra Mambrasar, SH, Albert Rumbekwan, SH, Ibu Abina Wasanggai, Juhari, SH dan Jance Rumaropen, SH dilantik oleh Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara. Pelantikan berlangsung di Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua, dihadiri oleh Gubernur Drs. JP Solossa, para Muspida dan undangan lainnya.

11 Januari

Saat menyerahkan PP Majelis Rakyat Papua No. 54/2004 kepada Wakil Gubernur Papua, drh. Constant Carma di Jakarta, Sekretaris Kantor Menkopolhukam Drs. Joko Sumaryono menyatakan MRP sebagai keberhasilan baru bagi bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat keutuhan NKRI.

Ketua DPRD Papua Drs. John Ibo menyatakan, DPRD akan segera menggelar Mubes untuk mendiskusikan pelaksanaan Otsus dan MRP sebagai bagian dari sosialisasi kepada rakyat Papua.

12 Januari

Sidang pertama kasus dugaan makar atas Filep Karma dan Yusak Pakage hanya berlangsung 15 menit di PN Jayapura dengan pembacaan dakwaan oleh JPU. Sidang berlangsung tanpa didampingi penasehat hukum. Filep Karma meminta sidang ditunda minggu depan agar dapat dihadiri penasehat hukum, sedangkan Yusak menyetujui sidang pembacaan dakwaan atas dirinya tetap dijalankan. Dalam dakwaan JPU, keduanya dituduh menyebarkan kebencian terhadap pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia alias 'makar, maka dijatuhi hukuman mati.

Menanggapi DPRD Papua yang berencana menggelar Mubes bersama untuk mendiskusikan perkembangan Otsus dan MRP, Gubernur Provinsi Papua Drs. JP Solossa menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah diajak mendiskusikan rencana Mubes tersebut oleh DPRD Papua. Mubes tersebut direncanakan akan digelar antara pemerintah daerah Papua, tim bentukan Presiden SBY dan masyarakat Papua.

Gubernur Papua Drs. JP Solossa mengumumkan, dari hasil rapat koordinasi dengan seluruh bupati se-Papua, disepakati agar pengumuman hasil test CPNS di seluruh Papua ditunda hingga ada klarifikasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Menurut Gubernur, dalam rapat dibahas juga mengenai hasil seleksi CPNS yang kurang proporsional dan dinilai kurang berpihak kepada putra daerah.

13 Januari

Kantor Departemen Agama Kabupaten Jayawijaya di Wamena dirusak oleh peserta test CPNS Departemen Agama yang tidak lulus. Sejumlah pelaku, mengaku sudah beberapa kali mengikuti test CPNS namun tidak pernah diterima sehingga merasa kecewa dan melampiaskannya dengan aksi perusakan tersebut.

Menanggapi rencana DPRD Papua menggelar Mubes untuk mendiskusikan perkembangan Otsus dan MRP, Bambang Sugiono dari ICS (Institute for Civil Strengthening) mengaku tidak memahami maksud diadakannya Mubes tersebut. Ia justru meminta DPRD agar menyusun Perdasi sebagai kebutuhan yang mendesak dalam menindaklanjuti Otsus.

16 Januari

Ketua DPRD Kabupaten Supiori, Otto Albert Msen menyatakan, menjelang Pilkada di kabupaten ini, sejumlah kandidat mulai bagi-bagi sembako dan uang pinang untuk mencari dukungan masyarakat.

18 Januari

Para Pemimpin Gereja-Gereja di Papua menghimbau semua denominasi gereja yang ada di Papua, khususnya di Jayapura agar turut memeriahkan pelaksanaan peringatan hari Pekabaran Injil yang ke-150 pada 5 Februari nanti.

19 Januari

Kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Koalisi Perjuangan Rakyat Sipil Papua melakukan demonstrasi di DPRD Papua, menolak MRP karena dinilai tidak sesuai aspirasi orang Papua dimana hak-hak kultural orang Papua sangat diibatasi dalam PP MRP dan keanggotaannya tidak mengakomodir 250 suku di Papua.

20 Januari

Danrem 172/PWY Kolonel Agus Muljadi menyatakan di Jayapura bahwa, dirinya mendapat laporan adanya penangkapan kelompok OPM yang selama ini melakukan pembakaran gedung-gedung sekolah dan sejumlah fasilitas umum di daerah Mulia. Mereka yang ditangkap adalah Keli Kwalik, Simelis Gire, Yothanur Wenda, Lapanus Wenda, Yohanis Hiluka, Yutimia Weya, Benius Kogoya.

21 Januari

Drs. JRG Djopari MA, Duta besar RI di PNG mengaku menyesal atas ketidakjujuran pemerintah Provinsi Papua dalam menggunakan dana Otsus. Menurutnya, seharusnya dana Otsus dipergunakan untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan kurangnya mutu kesehatan. Ia mengaku dirinya mendengar dari Mendagri bahwa Gubernur Papua tidak ingin penggunaan dana Otsus diperiksa oleh pemerintah pusat.

26 Januari

Tim Solidaritas PILKADA Kabupaten/Kota Se-Papua yang dipimpin oleh Marvin Tjoe dan Yonas Nussi mendatangi DPRD Papua, mendesak Pemda Provinsi Papua maupun DPRD Papua agar: mempercepat proses pemilihan dan pelantikan anggota MRP paling lambat pada Maret 2005, sesuai pasal 24 & 25 UU No. 21/2001 tentang Otsus; mengharap agar Perdasi dan Perdasus dipercepat penyusunan dan pengesahannya; meminta Gubernur selaku perwakilan pemerintah Papua sesuai amanat UU Otsus agar mengeluarkan tata cara PILKADA tingkat Kabupaten/Kota se-Papua.

27 Januari

Melihat lambannya pemerintah daerah melakukan sosialisasi tentang MRP, Dewan Adat Suku Sentani-Mamberamo-Tami berinisiatif mengadakan kegiatan sosialisasi MRP, bertempat di Gedung Tabita Sentani. Salah satu pemakalah, Barnabas Suebu SH menyatakan, meski UU Otsus sudah lama diundangkan, namun belum diimplementasikan hingga sekarang, padahal dana Otsus sudah dikucurkan sehingga dalam penggunaannya terjadi penyalahgunaan akibat mekanisme penggunaannya tidak terkontrol sesuai aturan dalam UU Otsus. "Misalnya, pada saat dana Otsus cair, penggunaannya oleh Pemda provinsi, kabupaten dan kota tetap melalui UU Otonomi Daerah No. 22/1999, padahal dananya cair berdasarkan UU Otsus. Akibatnya para bupati mempunyai kewenangan besar, seolah-olah menjadi raja-raja kecil". Menurutnya, untuk memperbaiki kehidupan pemerintahan di Papua, sekaligus mengimplementasikan Otsus, MRP diharapkan sudah dapat dibentuk dalam 3-6 bulan ke depan, dengan didahului oleh sosialisasi sehingga masyarakat mengetahuinya dengan baik dan dapat memilih figur yang tepat untuk duduk dalam MRP.

Dua korban dalam peristiwa penembakan aparat kepolisian di Kampung Mariedi, Distrik Fafuruar, Teluk Bintuni, Manase Furima dan Mathias Furima dijatuhi hukuman penjara masing-masing, 2,4 tahun dan 2,2 tahun oleh PN manokwari. Keduanya dituduh melakukan tindakan makar dengan menyerang aparat kepolisian yang melakukan pengawalan terhadap PT Djayanti Group (perusahaan HPH) pada 20 April 2004.

29 Januari

Desakan masyarakat agar MRP segera dibentuk dalam tiga hingga enam bulan mendatang, menurut Wakil Gubernur Provinsi Papua drh. Constant Karma, tidak dapat disanggupi oleh Pemerintah Provinsi. Menurut Wagub, untuk sosialisasi PP MRP saja akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, melebihi 6 bulan.

1 Februari

Sidang Adat III Dewan Adat Papua dengan tema "Membangun Dusun, menata Masa Depan; Masyarakat Adat Papua Bertekad Memperkuat Kepemilikan terhadap Sumber Daya Alam agar Menjadi Tuan di Negeri Sendiri", berlangsung di GOR Sanggeng Manokwari dan dibuka secara resmi oleh Bupati Manokwari, Drs. Dominggus Mandacan. Sejumlah muspida Provinsi IJB hadir pada pembukaan ini: Gubernur IJB Abraham Atururi, Pejabat Ketua DPRD IJB, Daud Mandowen, Rektor UNIPA, Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai, Kapolres Manokwari, Dandim Manokwari dan Sekda Kabupaten Manokwari.

Pada hari pertama Sidang Adat III di Manokwari, Ketua Dewan Adat Papua, Tom Beanal mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memberikan MRP, karena menurutnya di Papua telah ada Dewan Adat yang dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul. Tom juga berpesan agar seluruh masyarakat Papua menghindari konflik di Papua.

Berkaitan dengan penangkapan 7 orang anggota TPN/OPM di Mulia pada 20 Januari yang diberitakan berturut-turut salah satunya adalah Keli Kwalik, Pangdam XVII/Trikora, Mayjend TNI Nurdin Zainal menegaskan bahwa tidak ada nama Keli Kwalik diantara 7 orang tersebut. Pernyataan Pangdam, "Saya berkepentingan untuk menyampaikan ini agar publik mengetahui bahwa yang tertangkap dan mengaku sebagai pelaku pembakaran fasilitas umum di Kabupaten Tolikara itu bukanlah Keli Kwalik yang dikenal sebagai pimpinan pemberontak bersenjata di wilayah Timika". Nama yang sebenarnya adalah Manase Telenggen.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. D. Sumantyan HS, SH mengadakan kunjungan ke Mapolres Jayawijaya di Wamena untuk melihat dari dekat 7 anggota TPN/OPM yang ditangkap pada 20 Januari dan kini berstatus tersangka. Menurut keterangan Kapolda, dalam BAP atas nama Manase Telenggen, tetap dicantumkan nama 'Keli Kwalik alias Manase Telenggen'.

Koordinator Forum Partisipasi Merauke (FORPAMER) Fransisca Nuhuyan menyatakan, APBD adalah uang publik sehingga penganggarnya harus memperhatikan kepentingan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Ketua Komisi A DPRD Papua Yance Kayame mengatakan pihaknya menemukan adanya perbedaan hasil test CPNS di lingkungan Departemen Agama. Daftar hasil dari pusat tersebut dikatakan tidak cocok dengan daftar hasil yang telah diumumkan.

2 Februari

Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Koalisi Perjuangan Hak-Hak Sipil Rakyat Papua melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Papua. Mereka berorasi untuk menolak MRP, karena menurut mereka dengan adanya MRP dapat terjadi lagi kesalahan sejarah politik Papua yang dimanipulasi oleh Pemerintah Indonesia. MRP juga dinilai sebagai lembaga tandingan Dewan Adat Papua dan Presidium Dewan Papua.

Seorang perempuan bernama Fera Kambu (36) melaporkan suaminya, HW (31) ke polisi karena selama empat hari berturut-turut dianiaya suaminya. Kapolsekta Jayapura Selatan AKP Patric Jeujanen menerangkan bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka-luka di bagian telinga, mulut, dahi dan wajahnya kebiru-biruan. Suami korban akan segera dipanggil guna menjalani pemeriksaan.

3 Februari

Majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua Iksan, SH dan A. Lakoni Hernie, SH, MH serta Siswatmono Radiantoro, SH, menolak eksepsi kasus makar Filep Karma yang mengaku ia bukan warga negara Indonesia, tetapi warga negara Papua Barat.

Sidang kasus kaburnya kapal MV Afrika yang melibatkan mantan Kapolres Sorong AKBP Drs. Faisal AN beserta keempat mantan anak buahnya digelar dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dari kelima saksi yang dipanggil oleh JPU, diantaranya Brigjen Raziman Tarigan (mantan Wakapolda Papua), dan Irjen Polisi Made Mangku Pastika (Mantan Kapolda Papua) semuanya tidak hadir. Hanya Dr. Rudy Satriyo, SH, MA dari Universitas Indonesia yang hadir sebagai saksi ahli.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Suhartoyo, SH mengatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) AP Youw sedang diperiksa dan dipelajari oleh jaksa, apabila telah lengkap, maka pemeriksaan akan dilanjutkan lagi.

Dewan Adat Papua dalam Sidang Adat III Papua yang digelar di Manokwari sejak tanggal 31 Januari sampai 4 Februari 2005 mengeluarkan 12 butir pernyataan umum. Selain masalah MRP, disoroti juga masalah pemekaran Papua ke dalam 3 Provinsi. Dalam sidang itu, Tom Beanal terpilih kembali menjadi ketua DAP dan sekretarisnya Leonard J. Imbiri.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan Provinsi Papua, Ny. Ferdinanda Ibo Yatipay mengatakan Sidang III Dewan Adat Papua (DAP) harus memperhatikan dan merekomendasikan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan anak dan perempuan.

4 Februari

Ketua III DPRD Papua, Paskalis Kosay mengatakan MRP terlambat dibentuk karena ada masalah baru yakni munculnya rancangan peraturan pemerintah tentang Pilkada bagi Provinsi Irian Jaya Barat. Oleh karena itu DPRD Provinsi Papua bersama pihak Pemerintah Provinsi Papua harus mengurus masalah ini ke Pemerintah Pusat.

5 Februari

Peringatan 150 tahun Hari Pekabaran Injil (HPI) di Tanah Papua ditandai dengan berbagai kegiatan di berbagai daerah di Papua.

Menteri Agama M Maftuh Basyuni dalam sambutannya pada peringatan 150 HPI di Stadion Mandala Jayapura mengatakan dengan tema "Damailah Papuaku, damailah Indonesiaku, mengajak seluruh umat Kristiani untuk memahami kembali makna kedamaian yang menurut umat Kristiani merupakan kekuatan dari perdamaian yang menyelamatkan setiap orang yang mempercayainya.

Sementara itu, di Pulau Mansinam Manokwari, peringatan masuknya Injil di Tanah Papua dirayakan dengan menampilkan prosesi yang diperankan oleh para keturunan Ottow dan Geisler. Salah satu cicit Ottow, Prof. Dr. Yohanes Ottow, berperan sebagai Ottow.

Di Biak, perayaan 150 tahun masuknya injil di Tanah Papua ditandai dengan ibadah bersama yang digelar oleh Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor.

6 Februari

Wakil Gubernur Provinsi Papua drh. Constant Karma mengatakan belum dapat memberikan komentar tentang soal deadline pelaksanaan Otsus sampai tanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Papua (DAP) karena dirinya belum mempelajari ke 12 butir pernyataan tersebut dengan baik.

Seorang siswi SD berumur 10 tahun diperkosa oleh seorang pemuda berinisial LR (27 th) yang adalah guru sekolah minggu korban disamping salah satu gereja di Dok IX Kali.

8 Februari

Dandim 1707 Merauke, Letkol Inf. Paulus Herpomo Tribowo mengatakan, panglima perang TPN/OPM sektor lima, Yoseph Makunama menyerahkan diri di kediaman Bupati Merauke pada Selasa malam, sekitar pukul 21.00 WIT. Penyerahan diri tersebut semata-mata demi menjamin masa depan keluarganya.

10 Februari

Dandim 1707 Merauke Letkol Inf. Paulus Herpomo menjelaskan bahwa Yosep Makunama yang menamakan dirinya 'Panglima TPN/OPM Sektor V', menyerahkan diri di kediaman Bupati Merauke. Penyerahan diri tersebut difasilitasi oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke.

11 Februari

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Merauke, Petrus Renyut, S.Sos mengatakan KPUD Merauke telah mengajukan dana sebesar Rp. 18 milyar untuk menyukseskan Pilkada.

2 orang pemuda masing-masing Yayan M Sarawan dan Agus Mofu divonis masing-masing 3 tahun dan 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Biak Numfor yang diketuai Sarudi SH dengan dakwaan, melakukan persetubuhan dengan seorang anak berusia 14 tahun pada tanggal 13 Agustus 2004. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh JPU Sonya, SH yaitu 8 tahun penjara dengan denda Rp. 60 juta subsidier 6 bulan kurungan. Dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh kedua terdakwa terhadap korban adalah atas dasar suka sama suka.

15 Februari

AKBP Faisal A.N, mantan Kapolres Sorong, mengikuti sidang disiplin Polri di Mapolres Sorong terkait kasus illegal logging. Ia divonis melanggar disiplin kepolisian berupa penyalahgunaan wewenang, memanipulasi perkara, tidak melaksanakan perintah dinas, dan tidak menaati peraturan perundang-undangan serta membuat opini negatif tentang pimpinan.

Ketua DPRD Merauke, Daniel Walinaulik menjelaskan bahwa mantan anggota DPRD Merauke periode 1999-2004 menyatakan siap dipanggil dan diperiksa oleh kejaksaan terkait dugaan kasus penyelewengan keuangan negara sebesar Rp 4 milyar lebih.

Lima dari 7 orang anggota DPRD Provinsi Papua yakni Demas David Patty, S.pd, Yanni, Miriam Ambolon, Ramses Wally dan Yosefina Pigai dilantik oleh ketua DPRD Papua Drs. John Ibo, MM di Gedung DPRD.

Ketua KPUD Provinsi Papua, Ferry Kareth, SH optimis bila Pilkada Kota Jayapura akan berlangsung pada bulan Juni 2005.

Drs. John Gluba Gebze terpilih dalam Musda VII Golkar di aula Golkar, Jl. A. Yani Merauke sebagai ketua DPD Partai Golkar Merauke periode 2005-2010. Ia mendapat 9 suara dari 14 peserta dan mengalahkan Acang Wijaya yang hanya memperoleh 5 suara.

16 Februari

Ketua DPRD Kota Jayapura, Theopilus Bonay mengatakan sehubungan dengan akan diadakannya Pilkada pada bulan Juni mendatang, DPRD Kota Jayapura telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Drs. M.R. Kambu untuk mengundurkan diri sebagai walikota pada tanggal 24 Maret 2005.

Pemda Kabupaten Merauke kembali memulangkan sekitar 232 jiwa pelintas batas dari Daru, PNG. Rencana ini dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze. Bupati menjelaskan pelintas batas tersebut berasal dari 5 kampung di Merauke, yaitu Kampung Nasem, Kondo, Imbuti, dan Ndalir.

17 Februari

Anggota tim pemberdayaan Otsus Papua 2005, Bambang Sugiono, SH. M.Hum, mengatakan bahwa pembentukan MRP mempunyai tiga dasar hukum yakni, UU Otsus 21 tahun 2001 terutama pasal 19 sampai 25 dan 72; PP MRP No. 54/2004 yang diundangkan pada 23 Desember 2004; dan Perdasi tentang tata cara pemilihan anggota MRP.

Menanggapi dikeluarkannya PP No. 6/2005 tentang Tatacara Pelaksanaan Pilkada, ketua KPUD Papua Ferry Kareth, SH mengusulkan agar Pilkada di Papua dapat dijalankan secara bersama, baik di tingkat kota ataupun kabupaten.

Seorang sopir taksi jurusan Kota Raja-Abepura memperkosa seorang siswa kelas V SD berinisial WD (10 th) yang akan berangkat ke tempat les. Korban setelah diperkosa kemudian ditinggalkan di pinggir rawa kantor Dinas Otonomi Kotaraja, Jayapura.

18 Februari

Sebanyak 28 orang peserta yang berasal dari instansi pemerintahan, kepolisian dan kejaksaan mengikuti diklat teknis Capacity Building Mentor Indonesia-Australia Specific

Training Phase (IASTP) selama 5 hari sejak 13-18 Februari. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah.

Bupati Nabire, A.P.Youw melantik 10 kepala distrik se-Kabupaten Nabire, berdasarkan SK Bupati Nabire No. 8212-03 tanggal 11 Februari 2005.

19 Februari

3 dari 35 orang mantan anggota DPRD Merauke mulai dipanggil pada tahap pertama pemeriksaan dugaan kasus korupsi, masing-masing Wakil Ketua III Fabianus Binjab, SH, Marsono (anggota dari unsur TNI yang telah pensiun) dan Amri Karim selaku Sekretaris Dewan. Kajari Merauke, Eddy Soetiyono SH mengatakan bahwa mereka akan diperiksa pada hari Selasa, 22 Februari 2005.

Seorang wanita bernama Lasima (44 tahun) dianiaya oleh seorang pria berinisial EO yang dalam keadaan mabuk di warung Mandiri, perumahan Pemda Entrop.

24 Februari

Daud Mandowen dan Jimmy Demianus Ijie bersaing ketat dalam pemilihan ketua DPRD Irian Jaya Barat (IJB). Dari hasil pemilihan, Jimmy Ijie akhirnya diangkat menjadi Ketua DPRD IJB periode 2005 – 2010 dan Daud Mandowen diangkat sebagai wakil.

26 Februari

Di Biak sekitar 70-an kader Partai Golkar dari Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori melakukan aksi demo ke kantor DPRD, dengan tuntutan mendesak Musda DPD Partai Golkar Supiori ditinjau ulang.

Kejaksaan Merauke mengirimkan surat izin kepada Gubernur Papua untuk terus melanjutkan pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD Merauke.

Seorang siswi SMP di Kotaraja, Jayapura berumur 15 tahun diperkosa oleh kakak dan adik kandungnya sendiri dalam keadaan mabuk minuman keras.

2 Maret

Jumlah pelintas batas asal Merauke yang bermukim di PNG sebanyak 300 jiwa (semula terdaftar 232 jiwa) ingin kembali ke kampung halamannya. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Merauke, Daniel Walinaulik seusai memimpin tim ke Port Moresby, PNG.

3 Maret

Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Nurdin Zainal melalui Kapendam XVII/Trikora, Mayor CAJ G.T. Situmorang mengatakan, aksi separatis yang diduga dilakukan oleh kelompok Guliat Tabuni di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dengan menembak seorang warga sipil bernama Tinius Tabuni (33) menggunakan senjata M 16. Akibatnya, korban menderita luka di bagian kakinya.

4 Maret

Sebanyak 32 orang kontraktor proyek akan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Biak dalam kasus dugaan penyelewengan dana bantuan bencana alam bidang pendidikan TA 2003 di Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Hal ini ditegaskan kepala Kejaksaan Biak Numfor, Djoko Indra Setyawan,SH.

7 Maret

DPRD Papua mengingatkan Eksekutif berkaitan dengan penyusunan anggaran pelaksanaan PILKADA dan pembentukan MRP tahun ini, agar dana jangan habis untuk dua agenda itu saja, tapi perlu memperhatikan pembangunan di bidang lain yang menjadi prioritas.

8 Maret

Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat Papua (SMPRP) mendatangi kantor Gubernur Papua, menolak wacana pemekaran Papua menjadi 5 provinsi yang sedang dikembangkan oleh Gubernur Drs. JP Solossa. Koordinatornya, Y.P. Mandewas dalam orasinya mengatakan, wacana pemekaran Papua menjadi 5 provinsi bukanlah suatu solusi untuk mensejahterakan rakyat Papua, melainkan justru menyengsarakan rakyat. Selain itu, pemekaran hanya akan menguntungkan para elit-politik di Papua.

Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat Abraham O. Atururi digugat ke PTUN Jayapura oleh DPD Partai Golkar, DPC PPP, DPC PBB dan DPC PNI Marhaenisme, karena mengeluarkan SK peresmian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat yang dinilai tidak sesuai hasil Pemilu 2004.

15 Maret

Seiring dengan perkembangan pembangunan serta mobilitas penduduk yang cukup tinggi, Kota Enarotali yang menjadi jantung Kota Kabupaten Paniai kini tengah mengalami transformasi budaya. Tak hanya imbas dari pembangunan, saat ini tercatat angka kriminalitas di kota tersebut mulai menunjukkan peningkatan, terutama berupa tindak kekerasan.

16 Maret

Perwakilan masyarakat, pelajar dan mahasiswa korban dan pemilik dusun areal konsesi HPH PT Djayanti Group di Distrik Mimika Barat Jauh hingga Kapi Raya, Kabupaten Mimika, melakukan aksi demo ke Komnas HAM Perwakilan Papua, meminta Komnas menindaklanjuti pengaduan tentang penembakan terhadap empat warga di Potowayburu oleh Brimob pada 20 Januari lalu. Mereka meminta Komnas membentuk tim investigasi untuk segera menyelidiki kasus ini. Nama-nama korban penembakan adalah Octovianus Makai, tertembak kaki kiri hingga patah; Alem Makai, terkena pukulan popor senjata di kepala bagian belakang; Nico Degei, tertembak di paha kiri; Nicodemus Pokuwai, tertembak di tangan kiri.

LP3BH Manokwari meminta Pemda Manokwari, Pemda Teluk Wondama dan Teluk Bintuni agar segera melakukan sosialisasi PP No. 54/2004 tentang MRP sehingga orang asli Papua dapat memahami isi dari MRP, memahami hak-haknya dengan baik, dan dapat terlibat secara kritis dalam memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam MRP.

18 Maret

Berawal dari antri bensin di SPBU, TNI-Polri bentrok di Nabire.

20 Maret

Dari data yang dihimpun Cenderawasih Pos, dalam dua bulan terakhir terdapat peningkatan jumlah laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian di lingkungan Polresta Jayapura dengan korban terbanyak adalah para ibu rumah tangga. Menurut Kapolresta Jayapura, AKBP Drs. Moch. Son Ani, pemicu utama karena pelaku umumnya dikuasai minuman keras.

21 Maret

Meski PP No. 6/2005 tentang Tatacara Pelaksanaan Pilkada sudah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat dari berbagai daerah di Papua belum memahami dengan benar tata cara pemilihan tersebut. Dari laporan pemantauan persiapan pelaksanaan Pilkada yang dikeluarkan oleh SKP Keuskupan Agung Merauke dan Keuskupan Manokwari Sorong, sosialisasi justru hanya dilakukan di kalangan pemerintahan sendiri dan pada kelompok kepentingan yang bermaksud memenangkan Pilkada di daerah itu oleh tim sukses dari pejabat yang hendak mencalonkan diri.

Selain itu, dalam laporan dimaksud dicatat juga tentang adanya usaha penggalangan massa oleh berbagai kandidat dengan melakukan kampanye terselubung melalui pembagian liflet, poster, bagi-bagi uang serta sembako kepada kelompok-kelompok masyarakat. Fakta ini tidak hanya terjadi di Sorong dan Merauke sebagai kabupaten induk, melainkan terjadi juga di kabupaten-kabupaten pemekaran dari kedua wilayah tersebut.

31 Maret

Disela-sela berlangsungnya Sidang Komisi HAM PBB ke-61 di Jenewa, Swiss, dengan difasilitasi oleh Franciscans International, SKP Keuskupan Jayapura bersama Pemimpin Gereja-Gereja Papua yang diwakili Uskup Leo Laba Ladjar ofm dan Pdt. Herman Saud M.Th, melakukan kampanye dan sosialisasi tentang upaya pimpinan agama membangun persekutuan ditengah kemajemukan yang ada di Tanah Papua dalam semangat seluruh anggota masyarakat yang ingin memperjuangkan Papua sebagai Tanah Damai.

Adapun berbagai pokok keprihatinan yang disampaikan dalam forum internasional tersebut, diantaranya, tentang kondisi pelanggaran HAM di Papua yang belum terselesaikan secara adil dan tuntas sampai saat ini; adanya kontradiksi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Otsus; kondisi kesejahteraan masyarakat Papua yang sangat rendah dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dengan tingginya ancaman HIV/AIDS dan minimnya lapangan kerja; kehadiran aparat militer yang berlebihan di Papua; serta memanasnya pertarungan politik antara berbagai unsur yang berpotensi menimbulkan konflik. Menurut Uskup Leo dan Pdt. Herman Saud, semua keprihatinan yang mereka sampaikan tidak berdasarkan niat politik tertentu, melainkan semata-mata atas dasar nilai-nilai Injil yang mempersatukan semua orang.

B. Gambaran Situasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya

5 Januari

Menurut John Kunewara, anggota DPRD Provinsi Papua dan Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) kasus perdagangan kayu gaharu ilegal dan prostitusi liar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi, TPF dalam waktu dekat akan berkunjung ke Assue untuk meneliti kasus tersebut, sebagai tindak lanjut dari laporan SKP-KAM, November 2004 (*lihat www.hampapua.org*).

6 Januari

Kepala Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, MK, dihadapan penyidik Polres Mimika mengaku menggelapkan 67,86 ton beras miskin (raskin) milik masyarakat Mimika Barat selama tahun 2004.

7 Januari

Masyarakat kota Jayapura mengeluhkan minimnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat selama tahun 2004. Hal ini terlihat dari begitu sulitnya warga kota mendapat minyak tanah dan bensin, listrik yang sering padam, serta pelayanan air bersih dari PDAM yang tak kunjung baik. Masyarakat mengharapkan adanya perbaikan pelayanan di tahun 2005.

10 Januari

Ketua Fraksi Golkar DPRD Papua Jan L. Ayomi menyatakan kekecewaannya karena rencana pembahasan Arah Kebijakan Umum pembangunan di Papua antara DPRD dan Pemda Provinsi Papua batal dilakukan akibat ketidakhadiran Gubernur dan pejabat provinsi yang berwenang. Menurutnya, pembahasan ini sangat penting mengingat Arah Kebijakan Umum pembangunan yang dipakai dewasa ini tidak mencerminkan tuntutan Otsus. Ia mencontohkan Otsus yang mengatur perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua, namun sejauh ini tidak ada kebijakan nyata dari Pemda Provinsi yang memproteksi hak-hak tersebut. Kemudian indikator keberhasilan pada 4 bidang utama pembangunan: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, menurutnya masih bersifat teori semata yang dipakai dalam mengukur keberhasilan pembangunan di Papua.

Wakil Bupati Biak, Drs. Adrianus Kafiari menyatakan akan memeriksa penyebab langkanya minyak tanah dalam beberapa bulan terakhir di Biak sebagaimana dikeluhkan warga masyarakat.

11 Januari

Ratusan peserta test CPNS yang tidak lulus di Departemen Agama dan Departemen Kehakiman & HAM, berdemo ke DPRD Papua, memprotes banyaknya nama-nama yang lulus yang berasal dari luar Papua. Dalam penjelasan kepada DPRD, Kakanwil dari kedua departemen menjelaskan bahwa banyaknya peserta test asal Papua yang tidak lulus karena format test berlaku secara nasional, merupakan kebijakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Hal yang sama terjadi merata di seluruh kabupaten di Papua dimana test yang berlangsung secara nasional ini memberi ruang yang sangat kecil bagi pencari kerja di Papua untuk lulus seleksi.

12 Januari

Dua kapal penangkap ikan berbendera Cina, NV Shou Yu 697 dan NV Shou Yu 688 yang ditangkap di perairan Merauke karena melakukan pelanggaran penangkapan ikan berupa menggunakan fail trawl (*satu jaring ditarik dua kapal*), dituntut membayar denda oleh Pemkab Merauke sebesar Rp 1,5 milyar.

13 Januari

Mengamati maraknya aksi penolakan masyarakat terhadap hasil test CPNS karena hanya sedikit peserta putra daerah yang lulus, membuat Gubernur dan Bupati/Walikota se-Papua sepakat untuk menunda pengumuman hasil test CPNS hingga adanya klarifikasi dan penjelasan dari pemerintah pusat.

14 Januari

Gubernur Papua Drs. JP Solossa menyerahkan bantuan dana kepada 7 yayasan yang mengelola pendidikan di Papua dengan perincian: Rp 250 juta untuk YPK di Tanah Papua, Rp 250 juta untuk YPPK, Rp 150 juta untuk YPPGI, Rp 100 juta untuk Yapis Provinsi Papua, untuk Advent Rp 100 juta, SMU Gabungan Rp 150 juta dan YBPPA Papua sebesar Rp 50 juta. Menurut Gubernur, bantuan ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Provinsi dalam memperhatikan masalah penanganan pendidikan di wilayah Papua.

Dalam pertemuan antara Tim Pencari Fakta Kasus Assue yang dipimpin anggota DPRD Papua, John Kunewara dengan Wakapolres Merauke, Kompol L. Butje Kailuhu, Wakapolres mengaku bahwa beberapa anggota kepolisian yang dilaporkan terlibat dalam bisnis ilegal gaharu di Assue, sudah ditarik dan diganti dengan anggota yang baru.

17 Januari

John Rahail dari PKBI Papua meminta eksekutif maupun legislatif agar mengedepankan hak masyarakat atas pendidikan dan kesehatan, sehingga pemerintah tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik, tetapi peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diperhatikan.

18 Januari

Komisi D DPRD Papua meminta Dinas PU Provinsi Papua harus menjelaskan maksud dan tujuan dari rencananya untuk membangun rumah susun sebanyak 268 unit di kota Jayapura yang menggunakan dana APBN senilai Rp 12 milyar; apakah bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Sebab hal mendesak yang harus dilakukan adalah menata ruang kota Jayapura. Mengingat fakta di tempat lain, rumah susun ternyata menjadi masalah karena merupakan proyek yang diciptakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

19 Januari

Mesti dipertanyakan oleh Komisi D DPRD Papua, rencana pembangunan rumah susun di Jayapura tetap dijalankan oleh Dinas PU Provinsi Papua karena merupakan proyek dari pusat. Seperti ditegaskan oleh Kepala Dinas PU Provinsi Ir. Edwin Ichwan Ratulangi, "Perlu diingat bahwa anggaran yang akan digunakan untuk membangun rumah susun, bukan bersumber dari APBD, melainkan dari APBN. Pemerintah pusat yang memberikan dananya, masa harus kita tolak?".

23 Januari

Para perawat di RSUD Biak Numfor mengeluhkan terbatasnya alat medis habis pakai dan alat sterilisasi seperti, sarung tangan, jarum suntik dan spuit yang berisiko menularkan penyakit melalui peralatan medis, baik kepada perawat maupun kepada pasien lain.

Aparat kepolisian KP3 Udara yang bertugas di Bandara Sentani menggagalkan puluhan botol miras bermerk yang hendak diselundupkan ke Wamena. Tindakan ini sudah berulang kali terjadi di Bandara Sentani.

25 Januari

Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Papua mengumumkan hasil test CPNS yang sebelumnya disepakati untuk ditunda karena adanya aksi penolakan dari masyarakat. Di Biak, misalnya, kantor bupati dan DPRD dijaga ketat oleh aparat keamanan saat berlangsungnya pengumuman.

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua, Iriansyah menilai bahwa penerimaan CPNS di lingkungan Pemda Papua penuh dengan praktek KKN. Hal ini terbukti dari adanya peserta yang lulus tidak sesuai jurusan yang disyaratkan dalam radiogram Menkokesra tentang seleksi CPNS secara nasional, dan ada juga peserta yang mengikuti test untuk formasi pusat, namun bisa lulus untuk provinsi. Karena itu, ia mengharapkan pemerintah pusat dan daerah perlu konsisten dalam memberantas praktek KKN.

Selama 2004, penyakit malaria masih merupakan penyakit terbesar yang diderita masyarakat Biak Numfor, disamping ISPA dan infeksi kulit. Tingginya penderita malaria, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor disebabkan masih banyaknya tempat bersarang nyamuk malaria dan lingkungan rumah yang tidak tertata bersih.

26 Januari

Kapolres Jayapura AKBP Drs. Moch Son Ani mengatakan kepada wartawan bahwa, penangkapan truk yang memuat kayu tanpa dokumen di Jayapura, dilakukan oleh patroli Satuan Lantas Polresta Jayapura dan kayu tersebut milik Andi Rizal yang diangkut dari Koya Koso dan akan dibawa ke Jl. Baru, Abepura.

Pelajar dan guru Sekolah Perawat Kesehatan Negeri Wamena melakukan aksi demo ke kantor bupati setempat, menuntut pembayaran dana pelajar dan honor guru SPK yang belum dibayar Pemda Jayawijaya sejak tahun 2003. Kepala SPK, H. Saleh Seran, S.Pd mengatakan, bila tuntutan mereka tidak juga dipenuhi, SPK terpaksa ditutup mulai 31 Januari 2005 ini.

27 Januari

Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Sentani, Elieser Yaongka menjelaskan, sebagian muridnya masih trauma atas aksi pemalangan yang dilakukan Agus Yoku terhadap gedung SMP tersebut selama beberapa hari. Mereka belum berani masuk sekolah. Adapun pemalangan dilakukan akibat Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura belum membayar biaya pengerjaan jalan masuk sekolah yang telah dikerjakan Agus Yoku semenjak tahun 2001.

Sekitar 200 peserta test CPNS Kabupaten Jayapura yang tidak lulus, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jayapura dan mengajukan protes bahwa test tersebut tidak memprioritaskan warga asli Papua.

Kantor Departemen Agama Kabupaten Jayapura yang baru dibangun, menelan dana sebesar Rp 1,2 milyar.

Ketua DPRD Kabuapten Supiori Otto Albert Msen menyatakan, dari pemeriksaan dokumen kerja KM Surya Daharma 03 yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Supiori Selatan, terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dengan dukungan dari aparat keamanan setempat.

2 Februari

Dalam dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Kota Jayapura, bidan Kristin yang sehari-harinya bertugas di Puskesmas Distrik Abepura mengungkapkan bahwa diduga pemegang kartu sehat kebanyakan adalah orang mampu. Hal ini terlihat dari

penampilan para pasien pemegang kartu sehat yang datang berobat di Puskesmas yang pada umumnya seperti orang mampu, bahkan ada yang membawa telepon genggam.

Seluruh Kepala Sekolah di wilayah Distrik Abepura melakukan hearing dengan Komisi D DPRD Kota Jayapura sehubungan dengan kasus pemukulan terhadap kepala SD VIM III dan guru SMPN 6. Mereka mendukung ancaman aksi mogok yang akan dilakukan oleh para guru jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas dan mencari solusinya.

Kepala Perum Bulog Divre Papua, Abdul Hamid mengungkapkan bahwa jatah beras Raskin bagi masyarakat di Papua pada tahun 2005, turun sekitar 16 % dibanding jumlah jatah Raskin tahun 2004 lalu.

3 Februari

Kalangan perempuan yang tergabung dalam Liga Aksi Perempuan Amanat Rakyat (LAPAR) melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Jayapura. mereka meminta agar Walikota Jayapura Drs. M.R. Kambu segera turun tahta. Mereka menilai M.R. Kambu membiarkan masyarakat meratapi nasibnya karena pembongkaran pasar Ampera, pasar Ruko Dok II. Mereka juga menyinggung soal jabatan rangkap Walikota sebagai manajer Persipura, serta pelaksanaan proyek pembangunan yang dinilai tidak memperhatikan dampak lingkungan hidup.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura, Drs. Theodorus Arim, MSc mengatakan bahwa materi tambahan masalah penanggulangan HIV/AIDS bagi anak-anak sekolah saat ini sudah menjadi satu kebutuhan, karena itu untuk mencegah bahaya penyebaran HIV/AIDS dikalangan pelajar maka diharapkan masing-masing kepala sekolah memberikan kesempatan atau waktu untuk pengetahuan masalah HIV/AIDS.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Papua, Drs. Dominggus Rumbewas SH mengatakan program yang akan menjadi prioritas Dinas Kebudayaan pada tahun anggaran 2005 adalah penggalian nilai-nilai budaya, pengembangan kesenian daerah, bahasa daerah, permuseuman dan kepurbakalaan dan peninggalan sejarah.

13 Februari

Ratusan masyarakat Nafri, Distrik Abe Pantai mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi di Base G, Jayapura. Tonce Sibri, salah satu koordinator demo mengatakan tujuan mereka mendatangi kantor Dinas P&P adalah untuk meminta ganti rugi atas tanah SMP 4 Abe Pantai sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Jayapura, 1 Desember 2003. sementara itu wakil Kepala Dinas P & P Provinsi Papua, James Modouw. M, MT mengatakan proses hukum mengenai tanah SMP 4 Abe Pantai masih berjalan di pengadilan dan keputusan pengadilan itu belum memiliki keputusan hukum tetap.

14 Februari

Puluhan perempuan yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Kabupaten Keroom yang dipimpin oleh ibu Serafina Tuamis, mendatangi Kantor DPRD Keerom untuk menyampaikan aspirasi mereka menyangkut pelaksanaan pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP). Mereka menyampaikan bahwa sebenarnya mereka belum memahami

apa itu MRP dan bagaimana hak-hak perempuan di dalam MRP itu sendiri sebab belum pernah ada sosialisasi MRP di Keerom.

Pemerintah Provinsi Papua akan merevisi rencana tata ruang wilayah (RTRW), dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang terakomodasi secara baik antara kawasan atau kabupaten demi mewujudkan perekonomian dan lingkungan yang berkesinambungan serta untuk menciptakan keseimbangan antara kawasan lindung, kawasan budidaya dan tersusunnya pusat-pusat pemukiman perkotaan dan pedesaan secara teratur. Hal ini dijelaskan oleh Pjs Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Basalleng.

22 Februari

Kasus illegal logging disidangkan lagi dengan terdakwa I.H. Simon Sulaiman dan Danang Suhargo. JPU menghadirkan dua saksi M. Sitanggang dan A. Karubaba.

Sebuah pesawat milik TNI jenis Wing Cassa 212 – 200 tujuan Sarmi yang memuat 14 penumpang dan 4 awak pesawat jatuh ke laut saat hendak mendarat di Bandara Sarmi. Akibatnya, 15 orang meninggal dunia dan 3 orang luka-luka.

24 Februari

Diduga korupsi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Drs. Ferry Taberima, M.Kes diserahkan ke Polres Jayapura untuk diselidiki lebih lanjut. Dia diduga tidak mengucurkan dana bantuan Puskesmas sekitar Rp 500 juta.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, drg. Joseph Rinta. M.Kes mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke per Desember 2004, tercatat 12 orang bayi terinfeksi HIV. Sementara itu terdata sebanyak 16 orang anak usia 1 – 9 tahun terinfeksi HIV/AIDS dan kemungkinan besar tertular dari ibunya. Data jumlah penderita HIV/AIDS di Merauke dari tahun 1992 – 2004 adalah sebagai berikut :

Laki-laki	364 orang (52%)
Perempuan	291 orang (41,6 %)
Yang tidak tercatat jenis kelaminnya	45 orang (6,4%)
Yang sudah meninggal dunia	160 orang
Jumlah total penderita HIV/AIDS hingga 2004	700 orang
(jumlah tidak termasuk yang sudah meninggal)	

Ratusan massa yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Kayu Lokal se-kota/kabupaten Jayapura yang dikoordinir oleh J. Simanjuntak menggelar demo damai di kantor DPRD Papua. Mereka meminta agar dewan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, terkait status ijin usaha pengelolaan kayu mereka yang belum dikeluarkan. Hal ini berkaitan dengan adanya intimidasi dan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak keamanan di setiap pos yang terdapat di sepanjang jalan.

26 Februari

Setelah SMPN 4 Abe Pantai dipalang, sekarang gilliran kantor Distrik Jayapura Selatan dipalang oleh ondoafi Tobati-Enggros, Herman Hamadi. Mereka menuntut ganti rugi tanah dan segera turunkan Kadistrik Japsel Otniel Merauje, SE.

Demo Staf Dinas Kesehatan Jayapura berlanjut dengan menuntut agar Kadis Kesehatan Kota segera dinonaktifkan. Para staf dikoordinir oleh dr. Josef Wattimung.

28 Februari

Dalam sidang pembahasan RAPBD 2005 Kota Jayapura sebesar Rp 279.154.239.300, sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja aparatur (sebesar Rp 187,07 milyar) dibanding belanja pelayanan publik seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat yang dianggarkan hanya sebesar Rp 90,08 milyar dan belanja tak terduga sebesar Rp 2 milyar. Ketua DPRD Kota Jayapura, Drs. Theopilus Bonai mengatakan, DPRD Kota harus mengkritisi banyaknya program pembangunan yang diajukan eksekutif karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahkan tidak jelas.

1 Maret

Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Melalui Peraturan Presiden (Pempres) Nomor 22 Tahun 2005 tentang pengurangan subsidi BBM, ditetapkan kenaikan harga BBM rata-rata 29% dari harga lama. Harga baru ini mulai berlaku pada 1 Maret 2005, sejak pukul 00.00.

Menanggapi kenaikan harga BBM, Gubernur Papua, Drs. JP Solossa, M.Si mengatakan pasti akan ada penyesuaian tarif angkutan kota. Tentang jumlah kenaikan dan mulai berlakunya tarif baru itu, pihaknya masih harus mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan akan diatur dengan SK secara resmi. Gubernur juga meminta para pengusaha angkot maupun para sopir agar tidak menaikkan tarif angkutan kota sebelum ada surat keputusan resmi.

Health Crisis Center (HCC) Dinas Kesehatan Provinsi Papua melaporkan per 1 Maret 2005 tercatat 218 kasus demam berdarah di wilayah Provinsi Papua. Sebanyak 24 kasus di Kota Jayapura, 3 kasus di Kabupaten Jayapura, 117 kasus di Kabupaten Merauke, 19 kasus di Kabupaten Fak-Fak, dan 55 kasus di Sorong. Koordinator HCC Provinsi Papua, Paminto mengatakan kasus ini mengalami peningkatan terutama pada akhir Februari, dilaporkan banyak terjadi di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Sorong.

Ratusan mahasiswa bersama masyarakat menggelar demo di halaman kantor DPRD Provinsi Papua. Mereka merasa prihatin dengan terjadinya Illegal logging di Papua, meminta Kapolri secara tegas menindak oknum-oknum pejabat Dinas Kehutanan, baik di tingkat provinsi maupun di pusat yang terlibat dalam illegal logging. Yanpiet Bosawer, Ketua SMPT Universitas Cenderawasih mengatakan, pihaknya mengharapkan agar DPRD Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua segera mengeluarkan Perda guna mengamankan hasil hutan maupun sumber daya alam lainnya.

Sementara itu, Koalisi LSM Peduli Pemberantasan Illegal Logging di Papua yang terdiri dari ICS Papua, YPMD, WWF Sahul, CI Papua, YPLHC, PT-PPMA, FOKER, Alamku, DPMA-DU, eLPERA dan YPPWP mempertanyakan kinerja Tim Terpadu yang dibentuk oleh Gubernur Papua untuk pemberantasan illegal logging di Papua pada 16 April 2003 lalu. Menurut Direktur ICS, Budi Setyanto SH, tim yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI, POLRI, LSM dan LMA ini setelah dua tahun berjalan, tidak bekerja terfokus karena tidak jelas *job description*, sasaran dan periode tugas masing-masing.

Direktur LBH Papua, Paskalis Letsoin SH dalam konferensi pers mengatakan akan menggugat dualisme kebijakan pemerintah terhadap pengolahan hutan di Papua, dengan 3 bentuk tuntutan: meminta Presiden RI untuk memperbaiki aturan-aturan hukum yang berlaku di bidang kehutanan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat, meminta Kapolri untuk segera memeriksa Menteri Kehutanan dan stafnya karena

diduga telah melakukan kegiatan-kegiatan illegal logging dengan memanipulasi aturan hukum yang ada, dan meminta Kapolda Papua untuk segera memeriksa Kepala Dinas Kehutanan Papua karena juga diduga telah melakukan kegiatan-kegiatan illegal logging lewat aturan-aturan yang diterbitkan.

Sementara itu di Manokwari, massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Pelajar, Mahasiswa Meyah, Arfak dan Teluk Bintuni Anti Diskriminasi Hukum, mendatangi gedung DPRD Provinsi Irian Jaya Barat. Mereka meminta agar pemerintah menindak dengan tegas para pelaku illegal logging yang beroperasi di Papua. Koordinator aksi, Max Teniwut membacakan enam butir tuntutan, salah satu diantaranya meminta Presiden RI agar memerintahkan Kapolri untuk segera melakukan penyidikan terhadap aparat pemerintahan di bidang kehutanan mulai dari Dinas Kehutanan di daerah, sebagai pembuat kebijakan IPK-MA dan para pejabat yang mendukung administrasi tata usaha kayu sehingga praktek illegal logging dapat terjadi di daerah tersebut.

2 Maret

Untuk melakukan operasi illegal logging di Papua, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Aryanto Boedihardjo menyatakan, Polri akan mengerahkan 1.500 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Kejaksaan, Imigrasi, Departemen Kehutanan dan instansi lain. Operasi ini akan menyedot dan sebesar Rp 12 milyar yang diambil dari APBN. Menurutnya, pembentukan tim merupakan realisasi dari perintah langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Gubernur Papua Drs. JP. Solossa membantah pernyataan Koalisi LSM Peduli Pemberantasan Illegal Logging yang mempertanyakan kinerja Tim Terpadu Pemberantasan Illegal Logging yang telah dibentuknya. Dengan tegas dikatakan Gubernur bahwa tim terpadu yang dibentuk itu sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yakni melakukan pemeriksaan dan pengendalian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan illegal logging.

Terkait pemberantasan illegal logging, Kapolda Papua, Irjen Polisi Drs. D. Sumantyan HS, SH memberikan perintah kepada para Kapolres untuk melakukan *Stok Opname* (penghentian sementara) kayu olahan. Polda juga mulai mendata pengusaha kayu yang ada di seluruh Papua.

Di Jalan Kodam Baru, Polimak IV, seorang nenek berusia 60 th nyaris diperkosa dua orang laki-laki tak dikenal. Nenek tersebut berhasil melawan kedua laki-laki itu namun tubuhnya babak belur karena dipukuli oleh kedua lelaki tersebut. Kapolsekta Jayapura Selatan AKP Patric Jeujanen mengatakan pihaknya tengah menangani kasus tersebut. kedua laki-laki itu berdasarkan penyelidikan sementara, telah melakukan percobaan pemerkosaan dan juga melakukan penganiayaan.

Kawasan Terminal Entrop, Distrik Jayapura Selatan tergenang air setinggi 30 cm, khususnya pada tempat pemberhentian angkutan umum. Genangan seperti ini sudah sering terjadi jika hujan deras melanda kota Jayapura. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa kawasan di Kota Jayapura seperti yang dialami oleh para warga di sekitar Kotaraja, dengan genangan air setinggi rata-rata 10 cm.

Dengan naiknya harga BBM, para sopir angkutan kota di Sorong, Biak, Manokwari, Nabire dan Jayapura melakukan aksi mogok, menuntut pemerintah daerah menaikkan tarif angkutan kota.

3 Maret

Kapolda Papua Irjen Polisi Drs. D. Sumantyan HS, SH mengaku sudah mengantongi 10 nama cukong yang selama ini berada dibalik pencurian kayu secara ilegal di Papua. Ke-10 cukong tersebut telah resmi masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Papua, Drs. DF Dimara, MM, mengatakan salah satu dampak lingkungan yang cukup parah di Papua saat ini disebabkan eksploitasi hutan, termasuk illegal logging.

Wakil Gubernur Papua drh. Constant Carma dalam sambutannya ketika melantik pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Keerom mengatakan, Papua merupakan Provinsi di Indonesia yang mempunyai kasus HIV/AIDS tertinggi yaitu mencapai 1.749 kasus dan kebanyakan menyerang umur 20-29 tahun.

Dalam penyelidikan lapangan yang dilakukan Tim Pencari Fakta Kasus Assue pada tanggal 12 Januari-8 Februari 2005, ditemukan sejumlah fakta akurat terkait dengan kasus-kasus sosial akibat perdagangan ilegal kayu gaharu di Distrik Assue, Kabupaten Mapi, seperti, penjualan ilegal minuman keras, perjudian, dan bebasnya praktek prostitusi liar hingga ke kampung-kampung dan hutan pencarian gaharu yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat setempat. Menurut Ketua TPF Assue, Yohanes Kunewara, dari penyelidikan terindikasi praktek-praktek tersebut mendapat bekingan dari oknum TNI dan Polri serta pemerintah setempat melalui banyaknya retribusi dan pungutan liar yang dilakukan aparat tersebut hanya untuk kepentingan pribadinya.

4 Maret

Di Agats, ibukota Kabupaten Asmat, harga minyak tanah mencapai Rp 10.000/liter dan harga bensin mencapai Rp 20.000/liter. Harga tersebut menurut pengakuan warga, sangat menyengsarakan masyarakat kecil.

Kasubdin Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Keerom, Ir. P. Wally mengatakan, penebangan liar khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Keerom jelas-jelas merugikan masyarakat pemilik hak ulayat dan pemerintah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukannya, para penebang kayu tersebut tidak mematuhi peraturan kehutanan yang berlaku.

6 Maret

Di Sorong, Tim Mabes POLRI menahan kayu-kayu milik PT Uni Raya Timber dan CV Tam Raw Wilian yang diduga kuat sebagai hasil illegal logging karena tidak dilengkapi dokumen yang sah. Kedua perusahaan kayu ini berlokasi di Pulau Salawati dan Seget, Kabupaten Sorong.

Sedangkan di Kabupaten Fak-Fak, Satgas Operasi Hutan Lestari II-2005 menangkap 2 unit kapal yang mengangkut kayu dari Potowaiburu, daerah perbatasan Kabupaten Mimika dan Kaimana. Salah satu kapal yang ditangkap, KM Surabaya Expres, memuat kayu merbau sebanyak 3000 M milik PT Afona Mina Lestari.

7 Maret

Di Sorong, aparat kepolisian yang melakukan Operasi Hutan Lestari II menangkap tiga cukong kayu, menyita empat kapal bermuatan kayu sebanyak 28 ribu M³ dan 96 alat

berat. Total kayu merbau ilegal asal Sorong yang diamankan pihak kepolisian saat ini sebanyak 11.901 M3.

Maraknya kasus illegal logging di Papua, juga mulai mendapat reaksi dari Dewan Adat Papua (DAP). DAP dalam konferensi persnya yang dipimpin Tom Beanal, mendesak DPRD Provinsi membentuk tim pansus untuk mengusut tuntas kasus penyelundupan kayu di semua wilayah Papua, serta mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur posisi, peran dan hak asasi masyarakat adat dalam melakukan pemungutan hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, UU Kehutanan No. 41/1999. Bahkan dalam waktu dekat ini DAP akan menghadap Presiden Susilo Bambang Yodhoyono, meminta supaya penyelesaian kasus illegal logging diseriusi dan meminta aktivitas pengolahan kayu baik yang legal maupun tidak legal di Papua, diberhentikan.

Ketua DPRD Kabupaten Supiori, Otto Albert Msen, mengharapkan Pemerintah Kabupaten Supiori untuk lebih meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur, sebagai sektor utama untuk daerah yang baru terbentuk ini.

Dampak kenaikan BBM mulai dirasakan oleh warga kota Nabire, khususnya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Jika BBM naik 29 persen, bahan kebutuhan pokok naik justru menjadi 100 persen dari harga semula.

Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di Jayapura menyatakan keprihatinannya atas aksi guru-guru yang memalang sekolah-sekolah di kabupaten tersebut karena menuntut gaji dan hak mereka yang sudah beberapa bulan belum dibayar.

8 Maret

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Papua Ir. Marthen Kayoi dan Kadishut Provinsi Irian Jaya Barat Ir. ML. Rumadas secara resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus illegal logging di Papua, karena telah menyalahgunakan kewenangannya mengeluarkan IPK-MA (Ijin Pemanfaatan Hutan Masyarakat Adat). Hal ini sesuai keterangan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. D. Sumantyan, HS, SH.

Permasalahan anak di kota Jayapura dinilai sangat memprihatinkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Unicef bekerja sama dengan Yayasan Jaringan Peduli Anak Bangsa (JPAB) Provinsi Papua. Penelitian tersebut menunjukkan pada tahun 2004, angka anak putus sekolah, anak pekerja, kekerasan seksual anak, anak pengguna minuman keras, aibon dan obat terlarang sangat tinggi.

9 Maret

Akibat aksi mogok para supir yang menuntut dinaikkannya ongkos angkutan, ribuan penumpang di kota Jayapura terlantar, para pelajar terpaksa tidak masuk sekolah.

Meski APBD Kota Jayapura untuk tahun 2005 akhirnya disetujui DPRD Kota, namun seorang anggota Dewan dari Komisi C masih mempertanyakan besarnya anggaran pada beberapa program yang belum dijelaskan secara rinci maksud dan sasaran pemanfaatannya. Misalnya, pada program bantuan keuangan kepada ormas dan instansi vertikal yang mencapai angka milyaran rupiah.

11 Maret

Masyarakat di Kampung Kondo, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke mempertanyakan kualitas 14 unit perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat setempat yang dibangun oleh CV Pratiwi Jaya dan dibiayai APBD Kabupaten Merauke tahun 2004. Menurut warga, kondisinya saat ini terbengkalai alias belum selesai 100 persen dan hasil pekerjaannya sangat kasar, bahkan tidak akan bertahan lama.

13 Maret

Dalam Operasi Hutan Lestari II di Timika, Polres Mimika menangkap 3 WN Malaysia: Wong Tion Bang, Te Sing Chiu, Leon Thew Soon, karena diduga melakukan penebangan hutan secara ilegal di daerah Potowaiburu, Distrik Mimika Tengah. Ketiga WN Malaysia ini bekerja pada PT Kantona Mina Lestari, anak perusahaan dari Djayanti Group.

Polda Papua mengirim timnya untuk berkonsultasi ke Departemen Kehutanan dan Depdagri mengenai legalitas IPK-MA yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan di Papua, dengan berpegang pada UU Kehutanan No.41/1999.

14 Maret

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Peduli Rakyat (Ampera), menggelar demo damai ke gedung DPRD Provinsi Papua, menolak kenaikan harga BBM yang dianggap sangat menyengsarakan rakyat.

Dengan ditahannya Kepala Dinhut Provinsi Papua Ir. Marthen Kayoi di Rutan Polda Papua, Forum Komunikasi Rimbawa Provinsi Papua (FKRPP) dan para pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura bereaksi dengan memalang pintu masuk Kantor Dinas tersebut.

Sekitar 20 orang warga Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kotamadya Jayapura mendatangi kantor Walikota, meminta Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Koya Barat supaya diganti karena pelayanan di Puskesmas tersebut terlalu memberatkan warga miskin yang harus membayar dengan harga tinggi.

15 Maret

Gubernur Papua Drs. JP Solossa, M.Si saat dimintai komentarnya tentang kewenangan pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan IPK-MA sebagai salah satu pemicu kasus illegal logging di Papua, tampaknya lebih memilih diam dan tidak mau memberi komentar pada wartawan.

Dewan Adat Papua wilayah Sorong mendesak pihak kepolisian agar tidak berlaku diskriminatif dalam melakukan penyelidikan illegal logging di Papua, tetapi harus menyelidiki aparat TNI/Polri yang terlibat dalam praktek tersebut.

Desakan yang sama diajukan juga oleh anggota Pansus illegal logging DPRD Provinsi Papua dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. D. Sumantyan HS, SH di ruang rapat kantor DPRD Papua di Jayapura. Anggota Pansus meminta pihak kepolisian agar menyelidiki juga pejabat-pejabat di daerah seperti gubernur dan jajarannya serta pejabat pusat yang terlibat mengeluarkan berbagai izin yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya IPK-MA di Papua dan pungutan retribusinya yang selama ini masuk ke rekening Kementerian Kehutanan di Jakarta.

Nama DPRD Provinsi Papua diubah menjadi DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) sesuai amanat Otsus. Perubahan nama dilakukan secara resmi dalam rapat Panmus DPRD yang dipimpin oleh Ketua, Drs. Jhon Ibo.

Akibat kesulitan biaya angkutan, Pegawai Negeri Sipil di 6 (enam) Distrik di tiga Kabupaten baik Merauke, Boven Digul dan Mappi belum terima jatah beras selama tiga bulan sejak Januari, Februari dan Maret 2005. Enam Distrik yang belum terima jatah beras PNS tersebut adalah Nambai Bioman, Kepi, Bomakia (ketiganya di Kabupaten Mappi), Waropko dan Mindiptana (keduanya di kabupaten Boven Digul), serta Kimaam di Kabupaten Merauke.

16 Maret

Direktur LP3BH Manokwari, Jan Kristian Warinussy SH mendesak Pemda Manokwari, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni agar segera melakukan sosialisasi PP MRP kepada masyarakat sehingga isi MRP dapat dipahami dengan baik sehingga calon anggota MRP akan dipilih sesuai aspirasi masyarakat.

Dalam acara sosialisasi UU Otsus dan UU Pilkada yang dilaksanakan oleh KNPI Kota Jayapura, sebagian besar peserta dari berbagai organisasi pemuda yang hadir umumnya berpendapat bahwa Otsus identik dengan "uang banyak".

Meski telah memasuki tahun anggaran 2005, namun proyek-proyek tahunan (*multi-years*) yang diusulkan dalam RAPBD Kotamadya Jayapura terus mendapat sorotan. Pdt.Charles Simare-mare, S.Th, anggota Komisi C DPRD Kota Jayapura menilai masih banyak yang perlu dipertanyakan dan diperjelas dari RAPBD yang diajukan karena terkesan kurang transparan. Dan ada diantara proyek-proyek itu yang dinilai mubazir karena tidak berfungsi baik setelah selesai dibangun, misalnya, sub terminal Taman Mesran, Jayapura yang tidak memenuhi standar.

17 Maret

Kondisi sejumlah warga eks Ampera yang hingga saat ini bertahan di eks Bank Exim sejak pengusuran 13 Desember 2003 dinilai Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura, Iawanul Muslimin, merupakan salah satu bukti ketidakberhasilan Pemerintah Kota Jayapura dalam mengurus masyarakatnya.

Harapan masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Jayapura untuk secepatnya merasakan pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang saat ini tengah dibangun oleh pemerintah kabupaten, tampaknya harus tertunda. Pasalnya, dukungan dana dari pemerintah pusat melalui dana APBN dikabarkan batal dikucurkan tanpa alasan yang jelas.

Tahun 2005 Unicef memfokuskan pada 5 program utama yakni di bidang kesehatan, gizi, pendidikan, penanggulangan HIV/AIDS dan perlindungan anak. Dan 5 kabupaten binaan yang terus menjadi fokus program utama Unicef sejak 2001 lalu yakni Jayapura, Biak, Jayawijaya, Manokwari dan Sorong. Dengan dana yang dianggarkan untuk ke-5 kabupaten ini sebesar Rp.10 miliar, ungkap Kepala Perwakilan Unicef Wilayah Papua, Jolande Dekker, M.Sc.

18 Maret

Dari jumlah penduduk Merauke yang mencapai 160-an ribu jiwa ternyata yang tercatat sebagai keluarga miskin sebanyak 42 ribu kepala keluarga. (Data terakhir dari Dinas Kesehatan kabupaten Merauke tahun 2004).

Terkait dengan adanya operasi hutan lestari II, maka 10 kopermas yang ada di Nabire memberikan kuasa kepada 4 LSM yakni LBH Papua, Elsham Papua, Kontras Papua dan ALDP Papua untuk menggugat Menteri Kehutanan, Kapolri, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kapolres Nabire dan Kepala Dinas Kehutanan Nabire. Gugatan ini diajukan karena yang mengeluarkan ijin adalah pihak-pihak tersebut tapi sekarang masyarakat adat jadi korban dan disebut sebagai pelaku illegal logging.

20 Maret

DPMA Mamberamo-Tami menyambut positif rencana pihak POLRI sebagai Pelaksana Operasi Hutan Lestari II untuk memeriksa Gubernur Papua, Drs. JP Solossa dan Menteri Kehutanan terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan illegal logging di Papua.

22 Maret

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir. Marthen Kayoi mengaku kepada tim Pansus illegal logging DPR Papua bahwa Dinhut Papua telah menyeter ke rekening Menteri Kehutanan sebesar Rp 57 Miliar dalam bentuk dana PSDH (Profesi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) yang diperoleh dari hasil IPK-MA.

23 Maret

Operasi Hutan Lestari yang dilakukan di Papua oleh tim gabungan dari pusat sudah menangkap dan menjadikan 69 orang sebagai tersangka dalam kasus illegal logging. Dari 69 tersangka, 9 diantaranya adalah warga Malaysia.

Dari data BKKBN Provinsi Papua, dari 2001 hingga pelaksanaan Otsus memasuki tahun keempat, ternyata jumlah penduduk miskin di Papua mencapai 80 persen atau 1,5 juta jiwa dari 2,5 juta jiwa.

Puluhan aparat dan kepala desa dari Kabupaten Supiori mendatangi Kantor Bupati Supiori untuk menanyakan kejelasan mengenai pembayaran tunjangan dan dana operasional desa untuk triwulan pertama mereka.

Kasus malaria di Kabupaten Biak Numfor masih menduduki urutan pertama dari 10 kasus angka kesakitan. Bahkan sepanjang tahun 2004 dilaporkan angka kesakitan untuk malaria tropika 1552 orang dan malaria tersiana 27.613 orang.

29 Maret

Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, drg. Tohap Capah, bahwa sejumlah puskesmas di daerah ini mengalami kekurangan obat-obatan. Penyebabnya adalah minimnya sarana transportasi, tiadanya laporan pertanggungjawaban penerimaan obat dan verifikasi penyakit dari puskesmas-puskesmas, belum terdapat tempat pengawetan obat di tiap puskesmas dan minimnya tenaga farmasi yang dapat menangani obat-obatan tersebut.

Bagian II *ANALISIS PERKARA*

A. Hak Sipil dan Politik

A.1. Hak untuk Berpartisipasi dalam Politik dan Pemerintahan

"...Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan", DAN
"...Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pasal 43 (2) & 44 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Majelis Rakyat Papua (MRP)

Dalam kronik, bagian ini ditampilkan melalui beberapa fakta berikut ini. Awal tahun dimulai dengan diskusi hangat seputar Majelis Rakyat Papua (MRP) yang telah disetujui pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 54/2004 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Desember 2004. Oleh Presiden, PP MRP ini dijadikan sebagai 'kado Natal' bagi rakyat Papua dimana publik baru mengetahuinya pada saat Presiden mengumumkannya dalam perayaan malam Natal bersama dengan rakyat Papua yang berlangsung di Gedung Olahraga Cenderawasih, Jayapura pada 27 Desember 2004.

Setelah PP tersebut ditandatangani dan diumumkan, debat yang dilansir media di Papua hanya berkisar antara tuntutan masyarakat agar Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi PP MRP hingga ke masyarakat banyak, namun sayang bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Papua dan Wakil Gubernur yang sering tampil di media, hanya berpolemik di sekitar belum diserahkannya PP MRP oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua sehingga Wakil Gubernur Papua, drh. Constant Karma harus melakukan perjalanan khusus ke Jakarta hanya untuk 'menjemput' PP MRP di kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Setelah materi MRP berada di tangan pemerintah daerah, tuntutan diadakannya sosialisasi dalam rangka memberi informasi kepada masyarakat agar dapat terlibat secara penuh dan mendukung terbentuknya MRP, tidak dilakukan oleh Pemda Papua hingga tulisan ini disusun. Ada kesan yang kuat di masyarakat bahwa tiadanya upaya pemerintah untuk melakukan sosialisasi, dilandasi tiga faktor mendasar, *pertama*, adanya niat tersembunyi dari pemerintah daerah dalam membatasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan politik dan pemerintahan di Papua. Dimana ada kekuatiran dari sejumlah pihak dalam pemerintah daerah bahwa keterlibatan masyarakat dalam menentukan jalannya pemerintahan di Papua akan membatasi pola kerja birokrasi daerah yang selama ini terkenal kotor dan semakin kasat mata dalam masa Otonomi Khusus. *Kedua*, adanya upaya memperlambat proses pembentukan MRP guna mengamankan kepentingan pihak yang sedang berkuasa menjelang proses pemilihan kepala daerah (PILKADA) Gubernur Provinsi Papua pada bulan Oktober 2005 mendatang. Sebab salah satu kewenangan MRP adalah bersama DPRD Papua melakukan seleksi terhadap mereka yang hendak mencalonkan diri

sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua¹. Menjadi jelas bahwa kepemimpinan yang sedang berlangsung, sudah dikeluhkan masyarakat banyak karena praktek KKN yang begitu subur dalam era Otsus yang terkenal dengan membanjirnya dana di Papua. Ketiga adalah kemungkinan keengganan dari pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dilandasi kekuatiran adanya penolakan dari masyarakat bila mengetahui isi kewenangan dari lembaga MRP yang mendapat catatan dari beberapa pihak hanya sebagai 'lembaga persetujuan', bukan sebagai lembaga pengambil keputusan seperti kewenangan yang dipegang oleh DPRD Papua.

Namun demikian, berbagai kekurangan dan kelebihan dari isi PP MRP ini tetap penting untuk dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat terlibat secara sadar dalam segala proses pembentukan MRP, dimulai dari penyusunan perangkat daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) tentang tata cara pemilihan anggota MRP hingga proses pemilihannya sendiri yang tentu akan menyita perhatian publik di Papua. Publik pun dapat memilih figur yang tepat mewakili aspirasinya di MRP. Selain itu, pemahaman yang benar dapat juga membantu semua lapisan masyarakat di Papua agar dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja MRP di kemudian hari setelah lembaga ini terbentuk. Unsur keterlibatan dan pengawasan publik menjadi faktor penting guna membantu terciptanya pemerintahan yang bersih dan mengabdikan pada kepentingan rakyat, terutama dalam era Otonomi Khusus Papua dewasa ini.

Selain mengenai MRP, masyarakat juga disodori informasi seputar persiapan pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten/kota di Papua yang akan dimulai pada Juni 2005. Ternyata di beberapa daerah kabupaten mulai dilakukan upaya-upaya penggalangan massa yang terkesan tetap memakai cara-cara pembodohan melalui bagi-bagi materi berupa uang dan bahan makanan kepada pemilih. Bahkan ada kandidat yang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye resmi yang ditetapkan oleh KPUD setempat. Adu konsep dan program kerja yang mengedepankan kebutuhan masyarakat daerahnya masing-masing rupanya masih menjadi barang langka di kalangan calon pemimpin di Papua. Sayang bahwa media lokal yang ada belum berperan banyak dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pembacanya sehingga ada pemahaman yang cukup untuk secara maksimal memanfaatkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang baru diterapkan, khususnya di Papua, sehingga diharapkan kepala daerah yang terpilih adalah figur yang mampu membawa perubahan, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kesejahteraan bagi rakyat banyak di daerah ini.

Otonomi Khusus (Otsus)

Upaya mengimplementasikan Otonomi Khusus di tahun yang baru ini nampak semakin mengalami kemunduran dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tidak banyak lagi opini yang dikembangkan masyarakat Papua dengan berpedoman pada UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus dalam menilai jalannya kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Sejak tahun 2001, Otsus banyak dijadikan referensi masyarakat dalam menuntut perubahan pelayanan publik yang lebih baik demi menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan bidang-bidang relevan lainnya. Otsus baru kembali menjadi bahan perdebatan ketika pemerintah pusat memberlakukan PP 54/2004 tentang MRP, mengingat MRP merupakan instrumen politik yang sangat berperan dalam mengoptimalkan implementasi Otsus di Papua. Selain memang pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif dan presiden di tahun 2004 kenyataannya telah menyedot energi sosial yang ada sehingga seolah-olah publik di

¹ Baca pasal 36 PP No. 54/2004 tentang "Tugas dan Wewenang MRP".

Papua tidak lagi memikirkan Otsus yang sebetulnya merupakan hasil dari perjuangan panjang rakyat dalam mereformasi sistem hukum dan kehidupan berpolitik di daerah ini.

Sikap acuh-tak acuh masyarakat terhadap Otsus sebagaimana tercermin dalam minimnya pemberitaan media dalam tiga bulan pertama di tahun 2005 ini, kemungkinan dipengaruhi oleh semakin dalamnya ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap kemauan politik pemerintah pusat dalam membangun Papua yang kini mesti diwujudkan dengan menjalankan Otsus secara murni dan konsekuen, sehingga Otsus akhirnya dianggap sekedar 'gula-gula' politik yang disodorkan pemerintah, maka harus ditolak oleh masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah semakin menguat dengan kenyataan memilukan yang dimulai dengan pembunuhan Ketua Umum PDP, Theys Eluay, kemudian berlanjut pada tarik-ulur pembentukan MRP oleh pemerintah pusat, hingga keluarnya instruksi Presiden Megawati yang memberi angin bagi terbentuknya Irian Jaya Barat (IJB). Dinamika ini ditambah lagi belum adanya perubahan berarti dalam hidup masyarakat setelah hampir empat tahun sudah Otsus diberlakukan, lalu muncul sikap skeptis di kalangan masyarakat terhadap UU ini. Di sisi lain, sikap inipun semakin dipupuk dengan kenyataan dimana para pejabat di lingkungan Pemda dan kalangan terdekat mereka saja ditambah para pebisnis yang diuntungkan dari melimpahnya uang Otsus; indikasi suburnya praktek korupsi di era Otsus yang umumnya dipimpin oleh putra Papua sendiri. Pertanyaan kritis bagi kita semua adalah apakah Otonomi Khusus masih relevan sebagai salah satu upaya menangani konflik di Papua!

Sementara kalangan pimpinan daerah di Provinsi Papua sibuk menghabiskan dana Otsus, di awal tahun 2005 juga memperlihatkan semakin kokohnya posisi Irian Jaya Barat sebagai salah satu provinsi tersendiri, yang memang secara de facto diperkuat dengan telah berlangsungnya Pemilu legislatif maupun presiden di wilayah tersebut serta terbentuknya alat kelengkapan daerah provinsi seperti DPRD, dinas-dinas dan jawatan pemerintahan lainnya. Pihak-pihak di Manokwari terus berupaya melobi pemerintah pusat agar segera meresmikan status badan-badan pemerintahan dimaksud. Untuk itu, kekacauan administratif yang mengganggu konsentrasi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan ini dapat diatasi bila ada kemauan dari pimpinan pemerintahan di Provinsi Papua secara sungguh-sungguh mau menjalankan pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, alias bersih dan bebas dari praktek korupsi. Selain didukung pula dengan adanya kemauan politik pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik ini.

A.2. Hak Atas Penegakan Hukum

Aspek penegakan hukum dalam kurun waktu ini terutama diramaikan oleh operasi pemberantasan penebangan kayu ilegal (Illegal Logging) yang terdapat di hampir seluruh wilayah pesisir pulau Papua. Operasi yang dipimpin oleh jajaran Polri dibawah sandi, "Operasi Hutan Lestari II", seperti yang ditelusuri media memperlihatkan pihak kepolisian berhasil menyita ribuan metrik kayu log dan puluhan alat berat sebagai barang bukti, selain menangkap WN Malaysia yang terlibat dalam perdagangan ilegal ini dan menjadikan dua kepala Dinas Kehutanan di Papua sebagai tersangka. Namun, unsur terpenting yang memungkinkan maraknya praktek ilegal ini seperti bentuk jaringan dagang dan siapa saja yang terlibat memelihara jaringan tersebut sampai mampu menyebar hingga ke pelosok Papua, belum terungkap secara jelas dan terperinci selama Operasi berlangsung.

Luasnya wilayah penebangan dan lamanya praktek ilegal tersebut dilakukan tanpa adanya tindakan hukum dari aparat yang berwewenang, mengandaikan adanya suatu jaringan yang begitu kuat dan kebal hukum. Kasus keterlibatan mantan Kapolres

Sorong, Faisal Abdul Naser dalam praktek illegal logging di wilayah tersebut yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong, dapat memperjelas sinyalemen ini! Penyelesaian yang tuntas terhadap bisnis kayu ilegal di Papua hanya bisa dicapai bila penyelidikan hukum perlu menyentuh semua instansi pemerintah sipil maupun militer yang berkuasa di wilayah ini. Mengingat begitu merajalelanya para WN Malaysia menguasai hutan-hutan di pelosok Papua, sangat mungkin terjadi atas dukungan dari instansi ataupun 'orang penting', entah di Papua atau di Jakarta.

Selain itu, dinamika penegakan hukum tercermin pula dalam proses penyelesaian kasus penembakan di Kampung Mariedi, Teluk Bintuni, April 2004 yang TIDAK mengedepankan hak setiap warga negara untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Bila menilik kronologi kasus Mariedi², sebenarnya masyarakat merupakan pihak korban yang lebih menderita karena kehilangan dua orang warganya yang mati ditembak oleh pasukan Brimob Polda Papua yang menjaga areal HPH milik Djayanti Group di wilayah ini. Belasan warga Mariedi lainnya bahkan terluka dan kehilangan tempat tinggal mereka karena dibakar pasukan Brimob dalam peristiwa tersebut, disamping secara komunal mereka telah lama menderita dan kehilangan martabat mereka dengan hilangnya hak ulayat atas hutan, tanah, air, yang menjadi sumber pencaharian tradisional mereka karena dikuasai oleh Djayanti Group. Sebaliknya, para pelaku penembakan dan perusakan yang berstatus anggota Brimob justru dihindarkan dari pertanggungjawaban hukum oleh Polres Manokwari dengan menaruh stigma *separatis* terhadap kedua warga Mariedi oleh Polres Manokwari.

Hal yang sama terjadi juga di lingkungan Polres Merauke dimana anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Assue, Kabupaten Mappi yang terbukti terlibat dalam melindungi praktek perdagangan ilegal kayu gaharu, prostitusi dan peredaran minuman keras di wilayah tersebut, hanya dijatuhi sanksi administratif oleh atasannya³. Kenyataan demikian menunjukkan adanya upaya melanggar impunitas (kebal hukum) di kalangan aparat kepolisian yang notabene memikul tanggung jawab sebagai instansi pertama yang harus menjamin tegaknya norma-norma hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Selain impunitas yang memperlihatkan kelamnya upaya penegakan hukum di Papua, awal tahun juga diwarnai adanya diskriminasi dalam proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum. Terkesan adanya perlakuan yang berbeda dari para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menangani kasus-kasus dengan unsur makar, dan kasus-kasus kriminal seperti tindak pidana korupsi. Terhadap kasus-kasus makar, aparat penegak hukum sangat mematuhi kewajibannya untuk 'menyelenggarakan proses pemeriksaan dan peradilan yang cepat'; sebaliknya terhadap kasus-kasus korupsi, aparat nampak lamban dalam menindak dengan berlindung dibalik prosedur administratif dalam memeriksa para pejabat yang diduga melakukan korupsi sehingga lambat-laun penanganannya menjadi kabur dan tidak terselesaikan. Bukti bahwa di Papua, kepentingan politik dan kekuasaan dengan mudah dapat mengesampingkan tuntutan penegakan norma-norma hukum secara adil dan benar.

Amandemen UUD '45 mengenai Hak Asasi Manusia pasal 28 D mengatur:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

² Bdk. "Laporan Kronologi Penembakan Warga Sipil di Kampung Mariedi, Distrik Fafuruar, Teluk Kabupaten Bintuni, April 2004", oleh Sekretariat Keadilan & Perdamaian Keuskupan Manokwari-Sorong.

³ Kronologi Kasus Assue dapat dibaca pada Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Assue, Kabupaten Mappi, DPRD Provinsi Papua, Jayapura, Februari 2005.

A.3. Hak Atas Rasa Aman dan Kebebasan Pribadi

Pada bagian ini, perlu ditarik perhatian pada semakin meningkatnya tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di kota-kota kabupaten di Papua karena merajalelanya penggunaan minuman keras (minuman beralkohol) seperti terus dilaporkan oleh media massa. Hal yang sama telah dicatat pula dalam Laporan Triwulan Oktober-Desember 2004 yang dikeluarkan oleh SKP Jayapura. Meskipun harian Cenderawasih Pos setiap harinya melaporkan berbagai kasus kejahatan berupa pencurian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pelecehan seksual hingga tindak pemerkosaan terhadap perempuan dewasa bahkan anak-anak dibawah umur dengan pelaku yang umumnya dikuasai minuman keras, hingga saat ini Pemda Kabupaten/Kota maupun Provinsi tidak mengambil tindakan nyata untuk mengatasi problem sosial tersebut. Minuman keras (miras) yang tak terkendali dari tahun ke tahun semakin terbukti merusak ketenangan hidup pribadi, rumah tangga-rumah tangga, keluarga dan masyarakat Papua, sedangkan Pemda-Pemda di Papua justru mempertahankannya dengan alasan, sebagai sumber pendapatan daerah, bahkan mempermudah jalur penjualan dan distribusi miras hingga ke pelosok-pelosok daerah di Papua. Padahal biaya sosial yang harus dibayar masyarakat jauh lebih mahal daripada keuntungan yang diperoleh. Sudah saatnya Pemda perlu melakukan upaya alternatif dalam mengumpulkan pendapatan bagi daerah, daripada hanya mengandalkan sektor bisnis yang hanya menambah penyakit sosial semacam ini.

A.4. Hak atas Informasi yang Benar

Secara khusus unsur ini terkait dengan polemik selama dua minggu di bulan Maret yang dikembangkan aparat keamanan sehubungan dengan sejumlah warga sipil yang tertangkap di Mulia, Puncak Jaya. Nama "Kelly Kwalik" yang senyatanya tinggal di daerah Mimika, terus dipublikasikan sebagai nama dari pemimpin kelompok yang ditangkap di Mulia. Sekalipun Pangdam Trikora Mayjend. TNI Nurdin Zainal akhirnya mengklarifikasi nama anggota kelompok di Mulia tersebut bukan "Kelly Kwalik", tetapi "Menase Telenggen", namun opini masyarakat sudah terlanjur dibentuk dengan informasi yang tidak tepat selama sehari-hari, sedangkan identitas dari kelompok di Mulia yang baru tertangkap itu dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam peristiwa kekerasan yang terjadi di Mulia serta proses hukum terhadap mereka, akhirnya tidak terungkap lagi dalam pemberitaan media selanjutnya. Hal ini menandakan adanya indikasi upaya aparat untuk menciptakan wilayah Pegunungan Tengah sebagai wilayah konflik yang pada akhirnya menjadi legitimasi kehadiran aparat di wilayah tersebut. Adapun upaya mempublikasikan nama Kelly dalam kasus ini diduga kuat untuk mengaitkan keberadaan Kelly dan kekerasan di Mulia sebagai usaha memperluas wilayah kekuatan militer. Sangat disayangkan bahwa polemik ini tidak segera disikapi oleh kalangan masyarakat dengan menyodorkan suatu laporan alternatif yang dapat memberikan opini yang berbeda kepada publik yang ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dari peristiwa ini.

A.5. Hak untuk Mengungkapkan Pendapat

Sejak bulan Januari, masyarakat seolah bangkit dari kelesuan yang terjadi selama tahun 2004 untuk menyatakan pendapatnya dalam bentuk aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai kota kabupaten, lebih khusus di Jayapura sebagai ibukota provinsi, dengan kemasan isu yang berbeda-beda. Demonstrasi di kabupaten-kabupaten dalam kurun waktu ini sebagian besar dipicu oleh tidak lulusnya peserta test CPNS asal Papua mengingat format seleksi yang ditetapkan pemerintah pusat berlangsung secara

nasional. Di beberapa kota, demonstrasi dan aksi protes berlangsung tegang bahkan berujung pada perkelahian massa dan kerusakan fasilitas kantor-kantor pemerintah. Di Kabupaten Jayawijaya, khususnya, protes yang dilakukan masyarakat merupakan kelanjutan dari situasi yang sama di tahun sebelumnya akibat hancurnya kinerja pemerintah daerah setempat. Demo di Wamena senantiasa berakhir dengan mogok massal yang terjadi di berbagai instansi pemerintahan, tidak luput juga pada lembaga pendidikan/sekolah-sekolah dan instansi kesehatan. Sementara di Jayapura, aksi demo umumnya berkaitan dengan MRP yang baru disahkan oleh pemerintah pusat atau demo tentang persiapan Pilkada.

Menarik untuk mencermati isu-isu yang diangkat dalam aksi-aksi demonstrasi tersebut dimana tidak banyak menyentuh isu dan kepentingan yang paling mendasar dalam hidup masyarakat di Papua. Misalnya, kenaikan harga BBM atau kelangkaan BBM yang bila disimak pada media nasional, menyebabkan aksi protes di daerah-daerah lainnya di Indonesia dan dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat yang merasa terganggu kepentingannya. Akan tetapi hal ini di Papua hanya dilakukan oleh para supir angkot semata yang menuntut kenaikan ongkos angkutan sampai mogok sebagaimana yang terjadi di berbagai kota di Papua! Patut dipertanyakan tentang minimnya daya pikir kritis publik dalam menanggapi isu-isu mendasar yang menyangkut harkat hidup masyarakat kebanyakan yang mesti dilayani oleh pemerintah, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Publik, terutama kalangan terpelajar di Papua justru lebih tertarik pada isu-isu politis dan pemerintahan elitis ketimbang menyuarakan pola pelayanan publik oleh pemerintah yang selama ini tidak banyak menjawab kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Padahal ekspresi masyarakat yang kritis terhadap kinerja pemerintah dalam melayani kepentingan rakyat justru dapat membantu mengontrol jalannya pemerintahan dan secara perlahan-lahan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab atas kepentingan rakyat. Dinamika tersebut di atas merefleksikan dengan jelas bahwa keinginan untuk mereformasi pola pemerintahan di Papua agar lebih melayani kepentingan masyarakat di daerah ini tidak dapat tercapai bila desakan untuk perubahan hanya bertumpu pada isu-isu politis semata. Disamping tekanan untuk mereformasi struktur politik semisal melalui Otsus, MRP, Pilkada, dan sebagainya, aspek kesejahteraan masyarakat Papua dapat menjadi energi yang efektif guna menuntut perubahan pelayanan oleh pemerintah.

A.6. Peran Masyarakat Sipil

Keterlibatan masyarakat sipil dalam perubahan kemasyarakatan di Papua selama tiga bulan ini kebanyakan dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan pimpinan agama (gereja), serta pers. Kalangan mahasiswa, misalnya, kebanyakan memilih aksi turun ke jalan sebagai sarana mengungkapkan pendapat mereka dalam mengkritisi kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah daerah. Namun pola gerakan yang diperlihatkan mahasiswa terkesan partisan, insidental dan tidak terorganisir dengan baik sehingga tidak bergaung di masyarakat. Hal ini terlihat dari tidak begitu banyaknya warga masyarakat yang mengambil bagian dalam aksi-aksi demo yang dilakukan mahasiswa. Malahan masyarakat menilai sinis demonstrasi sebagai pengganggu ketentraman hidup warga kota sehingga keberadaan mahasiswa sebagai kelompok penekan belumlah terwujud. Pengorganisasian di kalangan mahasiswa agar terbangun menjadi organ gerakan yang solid, terstruktur dan berideologi kerakyatan, menjadi kebutuhan nyata yang mesti dikembangkan di kalangan mahasiswa di Papua.

Adapun diantara kelompok pemimpin agama sebagai benteng moral masyarakat, kalangan pimpinan gereja-gereja di Papua masih tetap konsisten dan aktif

memperjuangkan Papua sebagai Tanah Damai dalam berbagai momentum sosial yang ada. Perjuangan dan komitmen tersebut yang dilakukan terus-menerus akhirnya menyadarkan masyarakat Papua untuk secara perlahan-lahan menjadikan tanggal 5 Februari sebagai Hari Damai bagi seluruh umat di Tanah Papua. Menjadi menarik bahwa komitmen Papua Tanah Damai yang tetap menjadi simbol perjuangan massa, tidak terlepas dari upaya pemimpin gereja mengikutsertakan unsur pemerintahan daerah, baik sipil maupun militer dalam simbolisasi dan perayaan-perayaan perdamaian yang dipelopori mereka. Selain di Papua, upaya di tingkat internasional juga dilakukan untuk mengajak sebanyak mungkin solidaritas dunia dalam mendukung terciptanya keadilan dan perdamaian bagi masyarakat Papua.

Kalangan masyarakat adat yang menyuarakan aspirasinya secara formal melalui Dewan Adat Papua, peran kritisnya tidak banyak terdengar, kecuali sekali dalam menyuarakan problem illegal logging dimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat didesak agar menghentikan perdagangan kayu di Papua karena dinilai merugikan kepentingan masyarakat adat. Sejauh mana desakan tersebut didengar oleh pemerintah, tidak banyak pemberitaan tentang hal ini. Selain itu, sebenarnya dalam Musyawarah Dewan Adat Papua di Manokwari yang dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Pekabaran Injil, 5 Februari, dihasilkan salah satu keputusan penting berkaitan dengan tersendatnya pelaksanaan Otsus di Papua, yakni, "Dewan Adat Papua akan mengembalikan paket UU Otsus dan MRP kepada pemerintah pusat pada tanggal 15 Agustus 2005, bila pemerintah tidak memperbaiki komitmennya dalam menjalankan Otsus di Papua secara konsekuen". Sayang bahwa jalannya musyawarah dan hasil keputusan yang dicapai tidak banyak mendapat peliputan pada media di Papua, kecuali acara pembukaan. Namun demikian, kita nantikan saja apakah pada tanggal tersebut Dewan Adat Papua akan merealisasikan hasil keputusannya itu.

Perkembangan yang menyedihkan justru terjadi pada kalangan LSM di Papua yang perannya mulai redup bahkan bisa dikatakan 'mati' bila dibandingkan dengan peran kritis yang dimainkannya di tahun-tahun sebelumnya. Berbagai perubahan dan momentum sosial, seperti, implementasi Otsus, MRP, proses persiapan Pilkada, kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, pengambilan sumber daya alam di luar batas, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi serta melemahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Papua, dan lain-lain yang sedang terjadi, hampir luput dari pemantauan dan pendapat alternatif yang kritis dari kalangan LSM. Opini masyarakat lebih banyak dibentuk oleh informasi dan kebijakan yang disodorkan pihak penguasa. Maka dengan melemahnya gerakan LSM-LSM Papua, dikuatirkan dapat berimbas pada melemahnya posisi masyarakat dalam berhadapan dengan pemerintah.

Mengenai media di Papua, khususnya media cetak dengan tiras besar, pemberitaannya tidak banyak memperlihatkan komitmen untuk mendidik dan mencerdaskan publik, karena hanya melansir berita tentang kegiatan dan pernyataan-pernyataan dari kalangan pemerintah tanpa pendapat-pendapat alternatif yang muncul di masyarakat. Dana dan kualitas para jurnalis menjadi kendala utama dalam independensi media di Papua. Bahkan media cetak terlihat turut melanggengkan wajah diskriminatif dalam pemberitaan dengan senantiasa memamerkan kasus-kasus elit politik dan tindak kriminal yang dilakukan masyarakat sebagai berita utama (headline), sedangkan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang justru sangat merugikan kepentingan orang banyak, seringkali hanya diletakkan pada halaman-halaman belakang, bahkan ditulis dalam format kecil sehingga kurang menarik perhatian publik untuk membacanya. Dengan kondisi riil semacam ini, sulit untuk berharap pada media di Papua agar memainkan peran kontrol dalam membentuk opini masyarakat sipil di Papua agar dapat melibatkan diri dalam perubahan sosio-politik yang sedang terjadi.

B. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Analisa tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi selama bulan Januari-Maret 2005, meliputi beberapa permasalahan utama yang kami simpulkan dapat memberi gambaran sejauhmana hak-hak dasar masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dihormati dan ditegakkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah.

B.1. Hak atas Pekerjaan

Fakta yang menggambarkan unsur Hak atas Pekerjaan dalam kurun waktu tersebut di atas adalah maraknya tuntutan para peserta seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Papua terhadap hasil test yang dinilai mengesampingkan para peserta test asal Papua. Seleksi PNS kali ini berbeda dari bentuk seleksi PNS yang dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya di Papua. Bila di waktu lalu seleksi PNS diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Papua, maka test kali ini diselenggarakan langsung oleh pemerintah pusat sehingga bersifat nasional. Namun tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat tentang alasan perubahan model seleksi seperti ini. Akibatnya, sebagian besar peserta test asal Papua tidak lulus seleksi dan memicu demonstrasi dan protes di kantor-kantor pemerintah di tiap kabupaten dan DPRD Papua di Jayapura.

Meski menjadi jelas bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan, namun yang perlu digarisbawahi dari proses seleksi PNS kali ini adalah fakta bahwa pemenuhan hak ini terkait erat dengan kualitas individu yang bersangkutan. Karena itu, sekalipun dengan gencar semua unsur kemasyarakatan di Papua mengkampanyekan isu "Papuanisasi" di segala bidang kerja, namun hal ini perlu direfleksi secara mendalam, sejauh mana kesiapan dan kualitas sumber daya manusia Papua dalam merebut kesempatan-kesempatan kerja yang tersedia di Papua! Pertanyaan ini kemudian tidak terlepas dari model dan kualitas pendidikan yang diterapkan di Papua oleh berbagai lembaga pendidikan yang ada yang menghasilkan lulusan setingkat sarjana setiap tahunnya. Sekali lagi, menjadi catatan reflektif untuk kita semua dimana baru dalam seleksi PNS, sebagian besar calon tenaga kerja asal Papua tidak mampu bersaing dengan mereka yang berada di luar Papua. Bagaimana dengan sektor kerja swasta lainnya seperti perbankan, perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta yang jelas membutuhkan tenaga dengan tuntutan keahlian tinggi! Kemungkinan besar bahwa tidak banyak peluang dapat diraih oleh lulusan dari Papua.

Fakta yang menyedihkan dimana sebagian besar generasi pencari kerja Papua cenderung mengejar pekerjaan sebagai PNS di kantor-kantor pemerintah, yang sebetulnya terbatas dalam kapasitas dan jumlah penerimaan setiap tahunnya. Sementara sektor non-pemerintah yang senyatanya menjanjikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, justru semakin dikuasai oleh komunitas pendatang. Sekali lagi, hasil seleksi PNS ini menjadi peringatan untuk pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan agar berbenah diri, merubah kurikulum yang lebih adaptif terhadap tuntutan dunia kerja masa kini sehingga secara moral bertanggung jawab untuk tidak memperbanyak 'pengangguran berijazah' di Papua. Disisi lain, meluapnya CPNS merefleksikan bahwa sektor ekonomi kerakyatan tidak berkembang wajar guna mendorong tersedianya lapangan kerja alternatif di luar PNS.

B.2. Hak atas Kesehatan

Permasalahan kesehatan seperti tercatat pada bagian kronik, masih tetap memperlihatkan tingginya angka penderita penyakit endemik seperti malaria di Papua. Kemudian adanya keluhan tentang sarana medis yang minim, namun mengherankan

bahwa tidak tersedianya fasilitas medis yang sangat dasar justru terjadi di rumah sakit kota seperti RSUD Biak dan Jayapura. Bila daerah perkotaan yang mudah dijangkau saja mengalami kekurangan peralatan medis, maka dapat dibayangkan bagaimana dengan kondisi pusat-pusat pelayanan kesehatan yang terletak di kampung-kampung dan daerah terpencil Tanah Papua yang sudah sejak lama serba kekurangan dalam segala hal. Asmat, walaupun telah berkembang menjadi salah satu kabupaten sendiri, tidak berarti merubah statusnya sebagai daerah terpencil sehingga dengan mudah mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan HIV/AIDS tetap menjadi bahaya lainnya terhadap derajat kesehatan masyarakat di Papua. Minimnya sarana medis, tenaga maupun obat-obatan jelas menghambat terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang memadai.

Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Pasal 12 ayat 1 & 2a, b mengatur:
"Negara mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental; melalui pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, dan penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang".

B.3. Hak atas Kesejahteraan

Bagian ini tetap diwarnai keluhan masyarakat dimana-mana perihal kelangkaan minyak tanah ditengah naiknya harga Bahan Bakar Minyak. Karena langka, maka harga setiap liter meningkat hingga dapat mencapai 200% dari harga rata-rata yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1.200,-/liter .sehingga semakin melemahkan daya beli masyarakat di Papua. Misalnya, fakta di wilayah Asmat yang hanya mengandalkan transportasi satu-satunya pada angkutan laut dan sungai dengan bahan bakar utama adalah bensin, maka harga yang tinggi hanya semakin mencekik warga di daerah terpencil ini. Masyarakat yang tinggal di daerah kota juga mengeluh tentang seringnya dilakukan pemadaman listrik dan macetnya pelayanan air bersih oleh PDAM.

Sebagai catatan aktual awal tahun, maka penting juga untuk mengikuti pola pembagian/alokasi APBD baik di tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi sendiri. Dari kronik yang ada, terlihat bila pemerintah daerah tetap memakai pola lama dalam membagi anggaran pembangunan tiap tahun. Prosentase terbesar dialokasikan pada pembangunan sarana fisik, sedangkan aspek pembangunan non-fisik yang justru menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mendapat pembagian terkecil. Bukan tanpa maksud, karena sudah menjadi rahasia umum bila pembangunan sarana fisik seperti bangunan, jembatan, jalan dan sebagainya, memberi kemungkinan besar bagi pejabat yang bertanggung jawab atas setiap proyek dalam mendapat komisi. Suatu praktek korupsi yang terus dipelihara, kendati APBD saat ini sebagian besar bersumber pada dana Otonomi Khusus yang oleh UU Otsus diprioritaskan bagi pengembangan 4 bidang utama: pendidikan, ekonomi, kesehatan dan prasarana penunjang.

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Pasal 28 I (4) Amandemen UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia